

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat bermacam perangkat nilai yang bervariasi dan berdampak dari pendidikan terhadap nilai-nilai siswa, yaitu mulai dari:

1. Nilai kewarganegaraan, seperti dukungan terhadap hak pilih serta melaksanakan kewajiban untuk memilih, hingga
2. Nilai-nilai yang berhubungan dengan karakter individu. Nilai-nilai yang menghubungkan individu dengan kelompok masyarakat, sama halnya dengan nilai yang menghubungkan antar masyarakat dengan bangsa (*civic community*).

Pembahasan difokuskan pada lima negara di wilayah Eropa Utara yakni: Denmark, Jerman Barat, Belanda, Swedia dan Inggris. Kelima negara ini dipilih karena meskipun mereka memiliki latar belakang sejarah yang sama, namun kelima negara ini menawarkan sebuah perpaduan yang menarik dari persamaan dan perbedaan mengenai pendidikan nilai dalam tradisi mereka.

Sejak masa bangsa Romawi, kaum Saxon, bangsa Viking, serta sejak awal umat kristiani, kelima negara ini mendapatkan pengaruh dari kebudayaan yang sama, namun kelimanya tetap memiliki kekhususan / ciri khas masing-masing. Munculnya ide-ide Reformasi Kaum Protestan, *Renaissance*, Masa Pencerahan (*Enlightment*), serta Revolusi Industri, sangatlah berperan terhadap perkembangan nilai-nilai budaya dan institusi.

Pada masa kini kelima negara tersebut memiliki kesamaan komitmen dalam mempertahankan demokrasi parlementer, yakni a. tetap mempertahankan ajaran agama kaum kristiani namun tetap menghormati kemajemukan agama; b. serta memberlakukan wajib pendidikan umum bagi semua anak hingga usia 16 tahun secara gratis; c. telah memberikan hak kepada warga negaranya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan serta dalam memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Kecuali Jerman Barat yang agak belakangan. d. memberikan kebebasan kepada warganya (yang sudah dewasa) untuk menentukan nilai yang dianggap penting bagi diri mereka sendiri, serta memberikan kebebasan kepada para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka sesuai dengan sistem nilai yang mereka anut.

Pada era tahun 1980an, masyarakat ini harus berjuang mengatasi permasalahan; a. ekonomi, sosial dan politik, termasuk berjuang menghadapi demokrasi liberal yang mulai muncul di mana-mana; b. tantangan dalam mempersiapkan generasi muda mereka agar dapat hidup dengan layak di dalam lingkungan masyarakat global yang semakin berintegrasi; mereka cenderung menggeser nilai-nilai yang baik yang berhubungan dengan warisan kebudayaan yang mereka anut, maupun yang berhubungan dengan identitas nasional / jati diri bangsa mereka yang unik.

Pada saat ini, negara-negara tersebut; a. mulai menunjukkan minat akan peran institusi pendidikan di dalam pendidikan moral dan nilai; b. terdapat berbagai variasi baik variasi yang berasal dari masing-masing negara, maupun antar negara. Aneka variasi ini dapat memberikan gambaran mengenai serangkaian kategori yang dapat digunakan dalam memahami pandangan mereka terhadap pendidikan, khususnya faktor-faktor yang bersifat politis.

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah yang menjadi topik pembahasan cukup luas, karena itu diperlukan rumusan yang menggambarkan batasan permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan nilai dalam tradisi masyarakat Eropa barat ?
2. Bagaimana gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai pendidikan ?
3. Apakah ada dimensi konteks yang menjadi parameter pemerolehan nilai?
4. Apakah terdapat dampak yang ditimbulkan oleh keluarga dan sekolah terhadap seluruh individu di masa kanak-kanaknya ?
5. Apakah ada sumber informasi yang memadai mengenai peran institusi sekolah dalam pemerolehan nilai di negara-negara tersebut ?
6. Apakah terdapat persamaan dan atau perbedaan dalam pendidikan nilai?
7. Apakah terdapat pembaharuan minat terhadap pendidikan nilai ?

C. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan memahami hal-hal

sebagai berikut:

1. Pendidikan nilai dalam tradisi masyarakat Eropa barat ?
2. Gambaran atau model faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai pendidikan ?
3. Dimensi konteks yang menjadi parameter pemerolehan nilai?
4. Dampak yang ditimbulkan oleh keluarga dan sekolah terhadap seluruh individu di masa kanak-kanaknya ?
5. Sumber informasi yang memadai mengenai peran institusi sekolah dalam pemerolehan nilai di negara-negara tersebut ?
6. Persamaan dan atau perbedaan dalam pendidikan nilai?
7. Pembaharuan minat terhadap pendidikan nilai ?

D. SISTEMATIKA PENULISAN

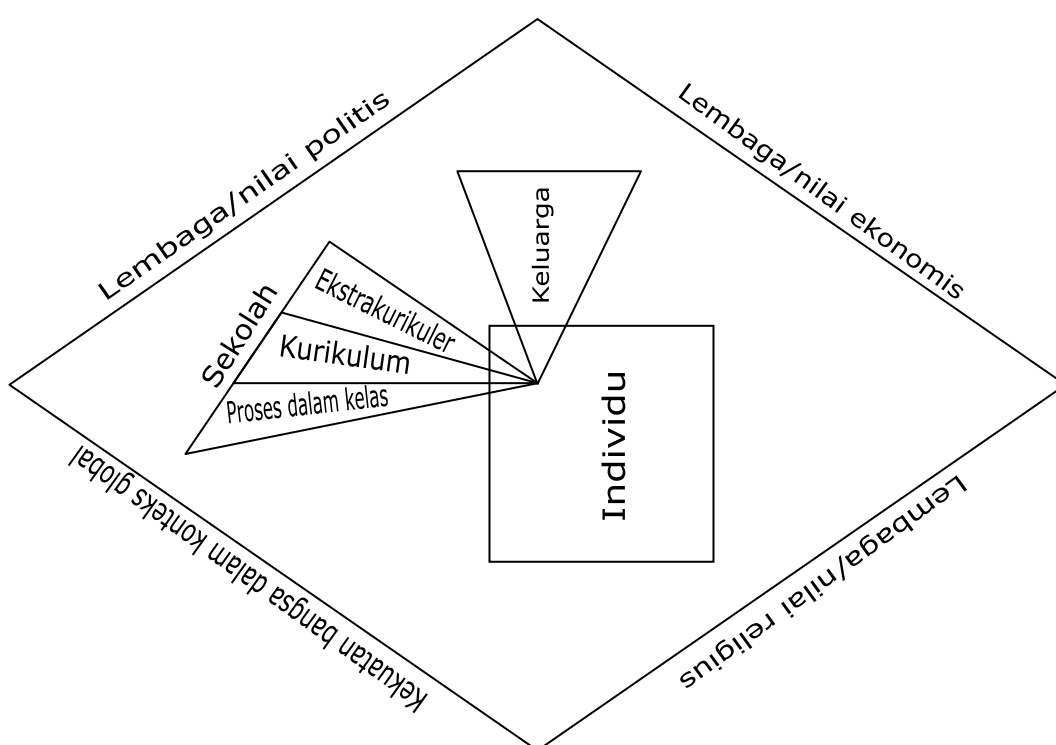
Sistematika penulisan dalam makalah ini terdiri atas kata pengantar, daftar isi dan dilanjutkan dengan bab I pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan dan sistematika, bab II berisi tentang; Gambaran atau model faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai pendidikan; Dimensi konteks yang menjadi parameter pemerolehan nilai; Dampak yang ditimbulkan oleh keluarga dan sekolah terhadap seluruh individu di masa kanak-kanaknya; Sumber informasi yang memadai mengenai peran institusi sekolah dalam pemerolehan nilai di negara-negara tersebut; Persamaan dan atau perbedaan dalam pendidikan nilai; Pembaharuan minat terhadap pendidikan nilai.

BAB II

ISI BUKU

A. Sebuah Model Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai-nilai Pendidikan

Model konseptual berikut ini pada dasarnya sangat berguna di dalam memahami pendidikan nilai dari bangsa-bangsa di dalam dan di luar Eropa. Visualisasi dari kategori-kategori yang terdapat pada sebuah model yang digunakan untuk memahami berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pandangan terhadap pendidikan nilai dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3.1. Pengaruh dalam pendidikan nilai

Model atau gambaran yang dimaksud adalah seorang individu belia. Model ini menitikberatkan pada peran keluarga dan sekolah dalam pendidikan nilai dengan rincian sbb:

1. ditampilkan secara luas dalam konteks kebangsaan /kultural/ komunitas
2. dibatasi oleh pengaruh yang berasal dari sekolah dan keluarga.

3. ketiga kategori ini adalah untuk mengorganisasikan pembahasan mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pemerolehan nilai-nilai sosial dan kewarganegaraan pada generasi muda,

4. serta mengatur pembahasan mengenai peran dari karakteristik individual, sekolah dan keluarga di dalam proses tersebut.

Pandangan kelima negara Eropa Utara mengenai pendidikan nilai digambarkan berdasarkan data-data yang dikumpulkan di Denmark, Inggris, Jerman Barat dan Belanda pada tahun 1985 - 1987, serta di Swedia pada tahun 1987.

B. Keempat Dimensi Konteks

Terdapat berbagai institusi yang menjadi parameter pemerolehan nilai individu yang dihubungkan dengan kelompok sosial, masyarakat, serta bangsa (*civic community*). Keempat parameter kontekstual ini di antaranya adalah,

- a. institusi politik domestik beserta nilai-nilai yang berhubungan dengan institusi ini,
- b. institusi ekonomi beserta nilai-nilai yang relevan dengan institusi ini,
- c. institusi keagamaan dengan nilai-nilai yang merupakan bagian dari institusi ini,
- d. serta sistem internasional.

Meskipun demi tujuan pembahasan, gambar 3.1 digambarkan secara fungsional, dengan generasi muda sebagai pusatnya yang merupakan resipien dari berbagai pengaruh, namun arah dari gambar ini juga dapat “diputarbalikkan” untuk menggambarkan pengaruh dari individu terhadap sekolah, keluarga, institusi sosial, maupun konflik di antara institusi-institusi tersebut. Pembahasan pada bab ini tidak bermaksud untuk menyanggah bahwa institusi-institusi ini seharusnya menetapkan parameter, sehingga dengan bantuan parameter ini pendidikan nilai masyarakat Eropa Utara dapat dipahami secara lebih baik. Dalam banyak aspek, pengaruh dari institusi-institusi ini terhadap penilaian pendidikan (nilai pendidikan) yang terjadi di sekolah dan keluarga, serta melalui agen-agen sosialisasi lainnya, seperti media masa, lebih bersifat tidak langsung.

Bab ini pada khususnya membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh keluarga dan sekolah terhadap seluruh individu yang melewati saat-saat terpenting dari masa kanak-kanaknya atau masa remajanya dalam lingkungan

tersebut (lingkungan keluarga dan sekolah). Perbedaan pada individu berdasarkan pemerolehan nilai tidaklah sebesar perbedaan yang diakibatkan oleh gender, kemampuan kognitif atau tingkat perkembangan moral seperti yang didefinisikan oleh Kohlberg. Gambar 3.1 memuat beberapa faktor individual penting yang dimaksud.

C. Keluarga

Pusat dari berbagai penelitian mengenai pengaruh dari orang tua terhadap nilai-nilai sosial atau kewarganegaraan adalah

- a. status sosio-ekonomi,
- b. tingkat pendidikan,
- c. latar belakang etnis atau imigran, serta
- d. orientasi politik (aliran kiri atau kanan) yang sering kali dihubungkan dengan keanggotaan sebuah organisasi politik.

Faktor-faktor ini memiliki peran yang penting dalam proses perolehan berbagai nilai yang menghubungkan individu dengan masyarakat dan kelompok sosial – sebagai contoh nilai-nilai yang berhubungan dengan peran para pekerja dalam sistem ekonomi serta nilai-nilai yang berhubungan dengan peranan warga negara dalam sistem politik. Pengaruh dari keluarga dapat bersifat langsung dan tidak langsung.

Model-model konseptual akan sangat berguna jika model tersebut dapat menunjukkan besarnya dampak faktor-faktor demografik, seperti pendidikan orang tua, terhadap generasi muda.

- a. Apakah orang tua dengan tingkat pendidikan yang lebih baik akan menganggap pendidikan nilai bagi anak-anak yang diberikan di lingkungan rumah jauh lebih penting dibanding mengandalkan pendidikan nilai yang dilaksanakan oleh institusi lain di luar rumah, seperti gereja atau sekolah?
- b. Apakah anak-anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua dengan tingkat pendidikan yang tinggi memperoleh kesempatan untuk mendengarkan berbagai sudut pandang dalam sebuah diskusi, atau juga memperoleh berbagai bahan bacaan yang sudah tersedia, seperti surat kabar?
- c. Apakah orang tua dengan tingkat pendidikan yang tinggi atau dengan status sosial yang tinggi lebih memiliki waktu atau sumber untuk secara aktif

berpartisipasi dalam masyarakat atau untuk membahas pertimbangan-pertimbangan yang mereka ambil dalam berbagai keputusan moral yang mereka buat, sehingga akan menjadi contoh bagi anak-anak mereka?

Berbagai proses ini memerlukan eksplorasi yang lebih jauh namun akan memerlukan penelitian yang bersifat lintas negara untuk meneliti perilaku orang tua, seperti halnya penelitian mengenai sekolah yang dibahas dalam bab ini.

Terdapat juga serangkaian faktor penting lainnya yang sangat jarang sekali diperhatikan dalam berbagai penelitian mengenai perilaku kewarganegaraan dan masyarakat, di antaranya

- a. latar belakang agama dan
- b. nilai yang dianut oleh keluarga, serta
- c. hubungan kedua hal tersebut dengan pendidikan nilai.

Hal ini tampak sangat jelas ketika salah satu negara tempat diselenggarakannya penelitian, yakni Belanda, memisahkan pendidikan dari landasan keagamaan. Hal ini akan memunculkan pertanyaan seperti, Seberapa besar pengaruh yang harus ditanamkan oleh keluarga dalam proses pendidikan nilai yang berhubungan dengan keyakinan / agama bagi anak mereka tanpa mencari alternatif lainnya (tanpa melibatkan institusi lainnya)?

D. Sekolah

Peranan sekolah dalam pendidikan nilai merupakan kajian utama dari bab ini. Pada bab ini akan dibahas mengenai tiga aspek utama dari sekolah.

- a. Aspek pertama adalah isi dari kurikulum khusus dan kurikulum yang diterapkan, terutama mata pelajaran yang berhubungan dengan ilmu sosial, sejarah, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, agama dan literatur / sastra. Kurikulum yang diajarkan mungkin akan berbeda, sesuai dengan jurusan yang diambil oleh siswa.
- b. Aspek yang kedua membahas mengenai proses di dalam kelas dan di lingkungan sekolah, termasuk juga besarnya penghargaan terhadap opini siswa, besarnya kebebasan siswa untuk tidak sependapat dengan guru serta tidak sependapat dengan cara pemaparan permasalahan dan cara mengajukan

pertanyaan yang diterapkan di kelas. Aspek ini juga mencakup pengaruh dari teman sebaya terhadap perilaku siswa di lingkungan sekolah.

c. Aktivitas ekstrakurikuler, seperti klub-klub kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswa dan kegiatan amal, merupakan dimensi ketiga yang akan di bahas dalam bab ini.

Perbedaan dalam ketiga dimensi di kelima negara akan diteliti. Beberapa pertanyaan penting dalam meneliti ketiga dimensi ini di antaranya,

- a. kelompok mana sajakah yang berpartisipasi dalam pembahasan / penentuan isi kurikulum;
- b. untuk bagaimanakah keterlibatan siswa dalam berbagai kegiatan yang ada;
- c. seberapa besar dan bagaimana sekolah dipengaruhi oleh keluarga serta agen-agen sosialisasi lainnya?

E. Berbagai Pertanyaan dan Sumber Informasi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran dari institusi sekolah dalam pemerolehan nilai di kelima negara Eropa Utara. Empat pertanyaan berikut ini diajukan di dalam penelitian ini:

1. Kesamaan apa yang di temukan dari sekolah-sekolah di kelima negara tersebut di dalam mengajarkan nilai-nilai (pendidikan nilai)?
2. Perbedaan mendasar apakah yang terdapat dalam pendekatan yang digunakan dalam pendidikan nilai di kelima negara tersebut?
3. Apakah terdapat pembaharuan minat dalam pendidikan nilai, jika iya, apakah alasan utama dari munculnya pembaharuan minat tersebut?
4. Kebijakan dan ide-ide penelitian apa saja yang dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pendidikan nilai?

Bahan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan kombinasi dari tiga sumber data yang berbeda. Sumber yang pertama merupakan data empiris yang bersifat kuantitatif, di dalamnya termasuk Survei Pendidikan Kewarganegaraan IEA (Asosiasi internasional yang mengevaluasi prestasi pendidikan / *International Association for the Evaluation of Educational Achievement*) dengan sampel para siswa yang berusia 14 tahun yang berasal dari

kelima negara Eropa Utara (Finlandia, Jerman Barat, Irlandia, Belanda dan Swedia) yang dipilih secara random dan berstrata. Survei tersebut dilaksanakan pada tahun 1971.

Sumber data kedua lebih bersifat kualitatif dan diambil baru-baru ini. Wawancara dengan para pendidik serta observasi di ruang kelas dilaksanakan pada tahun 1985- 1987 di Inggris, Denmark, Belanda dan Jerman Barat oleh *Carole Hahn*. Para profesor dari berbagai universitas serta berbagai pihak dari keempat negara yang sebelumnya pernah menerbitkan makalah dan artikel mengenai pendidikan dan bidang sosial, dihubungi. Mereka diwawancarai serta di minta untuk memberikan informasi mengenai pihak-pihak lainnya yang mungkin dapat memberikan informasi lebih yang dapat membantu memahami permasalahan yang sedang di teliti sesuai dengan kondisi negara si nara sumber.

Selain itu, semua nara sumber diminta untuk merekomendasikan sekolah-sekolah menengah serta wali kelas yang akan memberikan izin kepada seorang peneliti untuk mengamati kegiatan kelas dalam pendidikan politik dan atau sosial, serta untuk mengamati kelas-kelas lainnya dengan para siswa yang sedang berdiskusi mengenai persoalan-persoalan nilai. Di Inggris penelitian dilaksanakan di sembilan sekolah menengah, di Denmark di delapan sekolah menengah, di Belanda di tujuh sekolah menengah, dan di Jerman Barat sebanyak empat sekolah. Sekolah-sekolah ini pada umumnya berada di daerah pinggiran kota, atau di kota-kota berskala menengah. Survei ini melibatkan 1000 siswa sebagai responden untuk mengukur perilaku serta pengalaman kewarganegaraan (*civic*) mereka. Meskipun data yang terkumpul tidak secara langsung relevan dengan topik dari bab ini, namun data-data tersebut dapat memberikan pengetahuan mengenai beberapa persoalan yang di bahas dalam bab ini. Data dari survei ini diperkuat oleh berbagai artikel surat kabar serta dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh departemen pendidikan.

Sumber data ketiga berasal dari penelitian yang dilakukan di Swedia pada tahun 1987 oleh *Judith Torney-Purta*. Ia mewawancarai sekitar dua puluh pendidik yang berada di wilayah Stockholm, Uppsala, Malmo dan Gothenberg. Para pendidik ini terdiri dari pegawai dinas pendidikan serta departemen pendidikan, maupun para ahli dari bidang teori kurikulum, pendidikan

kewarganegaraan, serta pendidikan agama yang berasal dari universitas-universitas dan Fakultas Ilmu Pendidikan, serta sekelompok guru. Pada setiap sekolah yang dikunjungi penelitian dilaksanakan di dua kelas yang terdiri dari siswa yang berusia 14 tahun.

F. Kesamaan Tema dalam Pendidikan Nilai

Selain memiliki *persamaan dalam tradisi*, negara-negara Eropa Barat juga memiliki *banyak kesamaan tema dalam pendidikan nilai*. Di Eropa Utara, nilai-nilai tidak diajarkan secara terpisah dalam mata pelajaran yang diberi judul “pendidikan moral”, seperti halnya yang terjadi di beberapa negara Asia. Sebaliknya, nilai-nilai diajarkan secara implisit dalam banyak mata pelajaran sesuai dengan etos kerja sekolah dan terkadang disebut dengan “kurikulum tersembunyi”. Mata pelajaran yang mengajarkan nilai-nilai di antaranya, agama, sejarah, ilmu sosial atau pendidikan kewarganegaraan serta literatur / sastra. Mata pelajaran lainnya yang juga dapat bermuatan pengajaran nilai namun tidak sebanyak muatan yang terdapat pada kelompok mata pelajaran di atas adalah seni, bahasa asing, geografi, ilmu pengetahuan alam dan matematika.

Pendidikan agama merupakan bagian dari kurikulum sekolah di kelima negara, namun pengajarannya tidak perlu berdurasi lama. Pada awalnya, pendidikan agama di negara-negara Eropa Utara bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai yang dianut oleh kaum Kristen Judeo (*Judeo-Christian*), namun ketika negara-negara ini mendapatkan pengaruh dari kelompok agama lain, maka isi / materi dari pendidikan agama dikaji kembali.

Namun pada umumnya pendidikan agama di sekolah dasar masih berhubungan dengan kisah-kisah yang terdapat di dalam Alkitab. Para guru sekolah dasar berusaha untuk mengajarkan kejujuran dan rasa hormat terhadap pihak berwajib, terhadap hukum dan terhadap individu lainnya. Nilai-nilai diajarkan melalui persepsi dan contoh; hari-hari libur, seperti hari natal dan paskah diarahkan untuk pendidikan nilai.

Mata pelajaran agama di sekolah menengah mengajarkan mengenai keyakinan akan agama tertentu (sering kali berupa perbandingan dengan agama-agama lain) dan juga berupa aplikasi dari prinsip / teori etika dalam

permasalahan-permasalahan di bidang kemasyarakatan. Sebagian besar dari pendidikan nilai yang diberikan di sekolah dasar dan menengah ini beranggapan bahwa inti/ substansi dari beberapa nilai merupakan sesuatu yang dapat diajarkan, meskipun mayoritas guru mengajarkan proses pencarian jawaban dalam kehidupan serta proses pemilihan dan pengambilan keputusan dari nilai yang akan dianut.

Pengajaran nilai mungkin tidak tampak begitu jelas dalam mata pelajaran bahasa dan sejarah, namun mungkin akan lebih berpengaruh dikarenakan alokasi waktu yang dimiliki oleh kedua mata pelajaran tersebut. Bagian terpenting dari kurikulum sekolah dasar bertujuan untuk mempelajari nilai-nilai budaya dan kebangsaan melalui mata pelajaran bahasa dan sejarah nasional.

Anak-anak di Inggris menghabiskan berjam-jam untuk mempelajari kebudayaan nasional serta nilai-nilai budayanya melalui mata pelajaran sejarah dan sastra Inggris. Begitu pun dengan anak-anak di Jerman Barat, Belanda, Swedia dan Denmark yang mempelajari nilai-nilai kebangsaan mereka dengan jalan mendengarkan cerita-cerita mengenai orang-orang besar yang berasal dari bangsanya yang diberikan dalam mata pelajaran bahasa, literatur / sastra dan sejarah. Di jenjang sekolah menengah, mata pelajaran tersebut tetap diberikan dan diperhatikan baik dari segi waktu maupun dengan dimasukkannya ke dalam kelompok mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional.

Sejak Perang Dunia II, mata pelajaran yang sejenis dengan mata pelajaran “studi sosial” di Amerika Utara telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah menengah di kelima negara tersebut. Pada umumnya para pembuat kebijakan, para pendidik dan masyarakat sependapat akan perlu diadakannya pendidikan sosial dan kewarganegaraan, namun mereka tidak memberikan mata pelajaran tersebut status pelajaran wajib seperti halnya sejarah dan geografi. Pendidikan sosial atau pendidikan politik pada umumnya termasuk ke dalam sedikit dari mata pelajaran yang tidak diujikan, dan biasanya diajarkan dengan alokasi waktu yang sedikit. Namun meskipun terbentur dengan hal-hal tersebut, baik pendidikan sosial maupun pendidikan politik memiliki dimensi nilai yang implisit dan eksplisit yang dapat mempengaruhi banyak siswa.

Komponen-komponen lainnya dari kurikulum formal juga memiliki kontribusi terhadap pendidikan nilai. Pelajaran seni berhubungan dengan nilai-nilai estetika, sementara matematika dan ilmu alam mengajarkan nilai-nilai positif serta pentingnya kegiatan-kegiatan ilmiah. Namun pada dasarnya nilai-nilai ini bukanlah bahasan dari buku ini.

Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa isi dari kurikulum formal hanya akan efektif dalam menanamkan nilai-nilai jika iklim kelas dan iklim sekolah mendukung penerapan nilai-nilai tersebut. Hal tersebut dikarenakan dari pengalamannya dan dari model / contoh yang dilihatnya siswa dapat lebih banyak belajar dibanding dari apa yang diajarkan kepada mereka. Hal ini terbukti dalam penelitian IEA mengenai perilaku kewarganegaraan, yakni ketika siswa secara teratur berpartisipasi dalam diskusi kelas yang mendorong mereka untuk mengemukakan opini, maka mereka akan lebih memiliki pengetahuan dan minat politik serta tidak akan bersifat otoriter. Sebaliknya, siswa yang pada umumnya memperoleh pendidikan kewarganegaraannya melalui ceramah, hafalan dan ritual yang bersifat patriotik, lebih sedikit memiliki pengetahuan mengenai politik dan cenderung otoriter (*Turne dkk., 1975*). Besarnya kebebasan yang dimiliki oleh siswa sekolah menengah dalam mengembangkan dan mengekspresikan opini mereka mengenai persoalan sosial dan kewarganegaraan sangatlah penting. Peran dari pengalaman sekolah serta iklim kelas dalam pembentukan nilai yang berhubungan dengan perkembangan moral juga diilustrasikan dalam penelitian yang dilakukan oleh *Kohlberg* mengenai cara meningkatkan perkembangan moral melalui kegiatan diskusi dengan teman sebaya, khususnya di dalam tugas-tugas yang sesuai dengan konteks lingkungan sekolah (*Kohlberg dan Higgins, 1987*).

Di kelima negara Eropa Utara, *tradisi demokrasi liberal* memberikan kebebasan kepada warga negaranya (yang sudah dewasa) untuk mengajukan pertanyaan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi, namun pelaksanaannya di lingkungan sekolah berbeda-beda. Hasil wawancara dan observasi mengindikasikan bahwa beberapa guru berusaha mengarahkan diskusi bebas mengenai persoalan-persoalan yang kontroversial, sementara guru yang lainnya tidak, walaupun mereka menggunakan panduan kurikulum yang sama. Perbedaan jenis diskusi juga ditentukan oleh mata pelajaran yang diajarkan, usia siswa,

harapan masyarakat, serta kenyamanan guru dalam membahas permasalahan-permasalahan yang bersifat kontroversial. Diskusi terbuka mengenai persoalan kontroversial biasanya terjadi pada mata pelajaran studi sosial tingkat lanjut, mata pelajaran agama dan literatur / sastra di komunitas yang menganut nilai-nilai konstitusi liberal. Namun variabel yang paling signifikan dalam permasalahan ini adalah komitmen dari masing-masing guru untuk menyelenggarakan diskusi terbuka yang bertujuan untuk membahas dan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang kontroversial. Variabel lainnya adalah tingkat keyakinan guru akan kemampuan siswa untuk secara aktif menilai dan merefleksikan permasalahan tersebut terhadap sistem nilai yang mereka anut.

Di kelima negara, para guru menyadari bahwa topik-topik tertentu sangatlah sensitif untuk dibicarakan di dalam komunitas mereka; pada umumnya para guru akan berhati-hati dengan topik-topik tersebut, bahkan beberapa guru akan memilih untuk sama sekali tidak membicarakannya di kelas. Hanya di Denmark saja mayoritas guru menyatakan bahwa mereka merasa nyaman membicarakan berbagai persoalan kontroversial bersama siswa mereka. Di Swedia, sampai dengan tahun 1980 berlaku aturan bahwa silabus nasional hanya boleh membahas persoalan yang bersifat ilmiah dan objektif serta harus bersifat netral. Struktur seperti itu cenderung menghambat guru dalam membahas persoalan-persoalan yang bersifat kontroversial. Sejak peraturan ini ditiadakan pada silabus / kurikulum 1980, banyak dari guru yang setuju bahwa mereka kini merasa memiliki izin untuk membahas persoalan-persoalan tersebut dalam diskusi kelasnya. Namun bagaimana pun juga, masih banyak pihak yang tidak yakini bahwa di Swedia diskusi kelas mengenai persoalan kontroversial sama banyaknya dengan diskusi-diskusi kelas yang ada di Denmark.

Mengenai siswa sekolah menengah di keempat negara (tidak termasuk Swedia), menunjukkan bahwa para siswa di Jerman Barat merupakan kelompok yang paling setuju dengan pernyataan “di kelas kami sering mendiskusikan persoalan-persoalan kontroversial”, sedangkan para siswa di Inggris merupakan kelompok yang paling tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Namun, pada siswa di Belanda merupakan kelompok yang sangat setuju dengan pernyataan-pernyataan seperti: “Guru kami sangat menghargai pendapat kami serta

mendorong kami untuk mengemukakannya”, “di kelas ini, para siswa didorong untuk memberikan tanggapan terhadap permasalahan”, “Para siswa merasa bebas untuk secara terang-terangan tidak sependapat dengan guru mereka” dan “para guru berusaha mendorong para siswa untuk berbicara secara bebas dan terbuka di dalam kelas”. Para siswa di ketiga negara lainnya memberikan dukungan yang moderat terhadap pernyataan-pernyataan tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa para siswa menganggap ruang kelas mereka tidak terlalu kondusif bagi diselenggarakannya diskusi terbuka mengenai berbagai persoalan yang bersifat kontroversial, hal ini berbeda dengan keyakinan para guru atau dengan para pendidik di keempat negara yang menganut sistem demokrasi liberal ini.

Sarana informal lainnya di lingkungan sosial yang dapat memuat pendidikan nilai adalah melalui sistem bimbingan. Para guru, khususnya di tingkat sekolah dasar, dituntut untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para siswa, sedangkan para pembimbing di tingkat sekolah menengah diharapkan untuk mampu membantu mengatasi persoalan pribadi para siswa dan juga memberikan bimbingan karier dan pendidikan. Di Denmark, para wali kelas memegang kelas yang sama dari mulai kelas satu sampai kelas sembilan, sehingga hal ini akan membantu wali kelas mengenal siswa dan juga keluarganya sehingga ia dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat kepada siswanya. Di Swedia, mata pelajaran yang diberikan (seperti ilmu pengetahuan sosial) diajarkan oleh guru yang sama selama tiga tahun, dan penerapan sistem yang sama seperti yang telah diterapkan di Denmark sedang diperdebatkan. Di Inggris, penerapan “sistem pastoral” sangat terasa mewarnai tugas seorang guru, yakni menghadapi berbagai dilema kehidupan nyata para siswa yang pada umumnya berhubungan dengan nilai-nilai pribadi.

Berbagai proses dan norma informal, yang terkadang disebut sebagai kurikulum tersembunyi, merupakan sarana lain yang dapat dipergunakan dalam proses pendidikan nilai, terutama nilai-nilai yang berhubungan dengan persamaan gender. Para pihak berwenang di lingkungan sekolah menengah serta para menteri pendidikan biasanya didominasi oleh kaum pria. Observasi mengenai interaksi di ruang kelas menunjukkan bahwa para siswi dibandingkan dengan para siswa cenderung tidak begitu tegas secara verbal, serta kurang begitu berani mengambil

risiko, kecuali para siswi di negara Jerman Barat. Di Inggris sedang dilakukan upaya pengembangan unit kurikulum yang dapat mengatasi permasalahan gender ini. Di Denmark terdapat kesepakatan umum mengenai kesempatan bagi kaum wanita untuk berkarier, meskipun demikian berapa remaja putri menyatakan bahwa ketidakadilan masih tetap ada. Peranan tradisional dari kaum wanita dalam bidang pekerjaan dan politik diperkuat oleh pola pendidikan yang diterapkan di kelima negara. Observasi ini memperkuat data-data yang telah dikumpulkan dalam survei pada tahun 1971. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perbedaan dalam sikap politik kaum pria dan wanita pada dasarnya sama besarnya dengan perbedaan tingkat toleransi umum akan hak-hak kaum wanita serta akan jumlah kaum wanita yang memegang tampuk kepemimpinan politik di negara tersebut (*Tourney-Purta, 1984*). Sebagai contoh, di Swedia, negara yang dikenal akan persamaan gender, hasil penelitian terkini mengenai pengetahuan siswa dan siswi dalam bidang politik dan ekonomi di tingkat sekolah menengah masih tetap menunjukkan keunggulan kaum pria (*Lindquist dkk., 1987*).

Di samping mata pelajaran formal serta berbagai proses informal yang terjadi di ruang kelas dan di lingkungan sekolah, berbagai aktivitas ekstrakurikuler merupakan bagian penting dalam pendidikan kewarganegaraan di kelima negara Eropa Utara yang demokratis ini. Sekolah-sekolah memiliki dewan siswa, namun hampir seluruh siswa dan guru sependapat bahwa kewenangan dewan hanya sebatas merencanakan kegiatan-kegiatan sosial serta kegiatan alam, atau untuk mengurus berbagai persoalan seperti kasus siswa yang mabuk di lingkungan sekolah. Di Jerman Barat, beberapa kelompok siswa baru-baru ini mengadakan sebuah demonstrasi menuntut adanya perubahan dalam kebijakan konservatif yang diterapkan oleh menteri pendidikan, namun aktivitas siswa yang demikian sangatlah jarang ditemukan. Pada umumnya, di sekolah-sekolah menengah terdapat klub-klub siswa yang serupa dengan minat kelompok orang dewasa, namun bedanya klub-klub siswa ini tidak memiliki minat yang jelas dalam bidang politik, serta tidak berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di lingkungan sekolah, kecuali menyangkut persoalan-persoalan tertentu. Dorongan untuk kegiatan sosial, seperti perlindungan hewan dan lingkungan serta usaha untuk mengurangi jumlah kelaparan di dunia, mengajarkan nilai

mengutamakan kepentingan orang lain serta aksi kewarganegaraan. Meskipun siswa yang tergabung dalam kelompok politik remaja, seperti Kaum Konservatif Muda ataupun Kaum Demokrat Sosial, sangat sedikit jumlahnya, namun organisasi-organisasi tersebut mengajarkan berbagai nilai dan keahlian yang berhubungan dengan aktivitas politik kepada para siswa yang tergabung di dalamnya. Semakin banyak jumlah siswa yang belajar mengenai nilai kerja sama, kepemimpinan dan bekerja untuk kepentingan bersama melalui berbagai olah raga tim.

Pada umumnya, kelima negara memiliki kesempatan / momen yang sama untuk mengajarkan nilai. Inti dari nilai yang diajarkan juga relatif sama, yakni mengenai etos kerja, berbagai nilai yang berasal dari agama Kristen Judeo, nilai demokrasi dari partisipasi warga negara, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Penelitian IEA menemukan bahwa kelima negara yang diteliti pada dasarnya memiliki kesamaan dalam struktur perilaku, meskipun para siswa dari berbagai negara menunjukkan perbedaan dalam besarnya dukungan yang diberikan bagi perilaku ini. Di Eropa telah dirintis beberapa usaha untuk menyusun sebuah daftar pendek mengenai inti nilai yang sama yang dapat disetujui oleh para pendidik dan masyarakat, serta di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti kejujuran, taat hukum, serta menghormati orang lain. Dari kelima negara yang diteliti, Swedia menjadi negara terdepan dalam mengeksplorasi dan mengidentifikasi berbagai nilai untuk dicantumkan ke dalam daftar tersebut.

Banyak dari dimensi / berbagai faktor pengaruh yang disebutkan di dalam model, ditemukan di kelima negara. Nampaknya di kelima negara terdapat persamaan dalam usaha meningkatkan pendidikan nilai, hal ini mengindikasikan bahwa kepedulian akan nilai merupakan sebuah kepentingan global yang melampaui kepentingan masing-masing negara. Bagaimana pun juga, terdapat batasan-batasan penting yang berlaku di masing-masing negara, hal ini menyadarkan kita bahwa usaha untuk memahami pendidikan tidak dapat dipisahkan dari politik nasional, serta konteks ekonomi dan budaya. Faktor-faktor ini merupakan faktor pembeda yang paling mendasar dari setiap negara.

G. Perbedaan dalam Pendekatan Terhadap Pendidikan Nilai

Beberapa perbedaan yang terdapat di kelima negara ini bersifat nyata dan eksplisit, namun ada juga yang bersifat tersembunyi dan implisit. Sebagai contoh, di sekolah-sekolah di Inggris terdapat perbedaan yang nyata di banding dengan ketiga negara lainnya di mana para siswa memakai seragam sekolah. Anak-anak di Inggris tampaknya merupakan kelompok yang paling taat akan peraturan. Di banyak sekolah di Inggris para siswa menyapa gurunya dengan sebutan “Ibu... (*Miss*)” atau “Bapak... (*Sir*)” dan kemudian mereka menunggu untuk melanjutkan pembicaraan hingga mendapatkan izin dari gurunya. Para siswa sekolah menengah lebih banyak menghabiskan waktu mereka di kelas dengan menulis dibanding berbicara, hal ini sangatlah berbeda dengan para siswa di keempat negara lainnya.

Secara tradisional, Inggris menganut sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi, di mana masing-masing wilayah memiliki otonomi pendidikannya sendiri (*LEA / Local Education Authority*), dan terkadang setiap sekolah dapat menentukan kurikulumnya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan mengapa di satu sekolah diajarkan pendidikan sosial dan vokasional sementara sekolah yang lain hanya mengajarkan berbagai ilmu yang bersifat umum saja, dan di sekolah lain tidak terdapat mata kuliah mengenai pendidikan politik dan sosial. Kegiatan keagamaan serta misa harian di lingkungan sekolah merupakan mandat dari Undang-undang Pendidikan (*Education Act 1944*) tahun 1944, namun isi dari kegiatan tersebut diserahkan kepada *LEA* (masing-masing sekolah). Pada kenyataannya, meskipun setiap sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan kurikulumnya, namun terdapat kesamaan dalam isi kurikulum di seluruh sekolah, hal ini dikarenakan ujian nasional yang pada umumnya harus diikuti oleh siswa pada saat berusia enam belas tahun, dan 30 persen dari siswa tersebut mendapatkan nilai A. Sistem Ujian Pendidikan Umum Tingkat Menengah yang baru memungkinkan untuk terjadinya berbagai kesamaan dalam berbagai bidang di seluruh sekolah di Inggris. Sistem tersebut menggagas kurikulum inti nasional yang jika diimplementasikan dapat mengurangi berbagai perbedaan yang terdapat di setiap wilayah (*LEA*). Diperkirakan sekitar 90 persen dari keseluruhan jadwal sekolah akan ditentukan oleh kurikulum inti nasional.

Tujuh persen dari siswa di Inggris menimba ilmu di sekolah-sekolah swasta yang disebut dengan “sekolah umum (*public schools*)”. Sekolah jenis ini dijalankan dan dibiayai oleh pihak swasta, sekolah ini juga memberikan prioritas yang sangat tinggi akan pendidikan nilai. Banyak dari sekolah ini yang memiliki kapel (gereja kecil) dan juga memasukan agama sebagai salah satu mata pelajarannya. Berbagai cabang olah raga dianggap sebagai sesuatu yang penting oleh sekolah ini. Pada umumnya, kebanyakan dari para pemimpin politik dan para pemimpin bisnis merupakan alumni dari sekolah umum, hal ini diduga karena di sekolah umum mereka mempelajari berbagai nilai yang berhubungan dengan pelayanan umum serta wirausaha di samping mempelajari ilmu kepemimpinan. Sekolah umum di Inggris menerapkan sebuah model yang menurut pendapat beberapa pihak harus ditiru oleh sekolah-sekolah negeri, yakni dengan memasukan pengajaran tata karma dan pengajaran nilai ke dalam kurikulum mereka.

Negara Jerman Barat merupakan negara yang menganut sistem federal, di mana tanggung jawab akan pendidikan berada di tangan departemen pendidikan di masing-masing 11 negara bagian. Sebagai contoh, mata pelajaran sejarah atau agama di seluruh sekolah di negara bagian *Nordrhein-Westfallen* mengacu kepada panduan kurikulum yang berlaku untuk negara bagian tersebut, namun mata pelajaran ini akan berbeda dengan mata pelajaran pada sekolah-sekolah di negara bagian Bayern atau pun Hessen, karena setiap negara bagian memiliki panduan kurikulumnya sendiri. Konteks maupun iklim politik di setiap negara bagian tampaknya mempengaruhi cara penanganan berbagai permasalahan nilai. Sebagai contoh, pada era 70 dan 80an di sekolah-sekolah yang berada di negara bagian Hessen banyak diselenggarakan berbagai diskusi mengenai berbagai persoalan kontroversial, dibanding di negara-negara bagian lainnya yang masih konservatif. Namun pada tahun 1987, ketika koalisi kanan berkuasa di Hessen, maka filosofi serta pola organisasi dari sekolah-sekolah komprehensif yang dulu populer pada saat partai Sosial Demokrat berkuasa mulai mengalami pergeseran. Hal ini akan menimbulkan perubahan sikap terhadap berbagai diskusi kelas mengenai persoalan yang bersifat kontroversial.

Di Belanda, pemerintahan di berbagai tingkat – negara, provinsi dan kota madya – memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan, sehingga negara ini memiliki banyak sekali aturan-aturan nasional yang mengatur bidang pendidikan, salah satunya adalah undang –undang parlemen, serta berbagai ketetapan yang mengatur pengimplementasiannya. Undang-undang pendidikan ini – undang-undang pendidikan dasar dan undang-undang pendidikan menengah-memuat aturan mengenai standar kurikulum dan standar ujian. Menteri pendidikan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan menengah di sekolah-sekolah negeri, walikota bertanggung jawab terhadap sekolah-sekolah yang memiliki otonomi lokal, sedangkan dewan sekolah bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pendidikan menengah di sekolah-sekolah Katolik, Protestan ataupun sekolah-sekolah swasta yang tidak ada hubungannya dengan agama tertentu. Perbedaan dalam kewenangan tersebut dapat mengakibatkan adanya perbedaan dalam pendekatan terhadap pendidikan nilai, namun perbedaan tersebut tidaklah sebesar yang dibayangkan. Sebagai contoh, dari hasil pengamatan dalam penelitian ini para guru di ketiga jenis sekolah terbukti sama-sama mengadakan berbagai diskusi kelas mengenai berbagai persoalan nilai yang bersifat kontroversial. Proses wawancara terlebih dahulu dilakukan sebelum para guru ditempatkan di setiap sekolah, sehingga guru-guru yang tidak merasa nyaman dengan aturan-aturan yang berlaku di sekolah-sekolah Protestan dan Katolik tidak akan ditugaskan untuk mengajar di sekolah tersebut.

Pengajaran etos kerja merupakan salah satu bagian penting dari pendidikan nilai pada mayoritas sekolah-sekolah di Belanda. Sekolah-sekolah yang tidak bertujuan mempersiapkan para siswanya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (seperti di *a gymnasia athenea* atau *lycea*) akan membekali siswanya dengan berbagai mata pelajaran yang bersifat vokasional. Para siswa sekolah menengah umum (*havos, mavos* atau *lavos*) pada umumnya mempelajari mata pelajaran yang bersifat vokasional seperti juga mata pelajaran umum lainnya. Siswa sekolah menengah lainnya terdaftar di sekolah-sekolah vokasional atau kursus-kursus keahlian. Bagian yang paling signifikan dalam keseharian dari mayoritas siswa tingkat menengah, serta bagian terbesar dari anggaran pendidikan nasional dialokasikan untuk kegiatan pelatihan / persiapan kerja.

Sejak 1968, seluruh sekolah di Belanda mengajarkan *maatschaapijeer* (mata pelajaran sosial) yang merupakan mata pelajaran yang tidak diujikan, di samping mengajarkan sejarah dan geografi yang termasuk ke dalam kelompok mata pelajaran yang diujikan. *Maatschaapijeer* terdiri dari enam bidang kajian – pendidikan, rumah dan lingkungan, kerja dan waktu luang, negara dan masyarakat, teknologi dan masyarakat serta hubungan internasional. Pada tahun 1987 para anggota parlemen yang sangat konservatif mengajukan proposal untuk menentukan alokasi waktu minimal bagi mata pelajaran dasar pada tiga tahun pertama jenjang sekolah menengah, namun dalam proposal itu tidak mengikutsertakan *maatschaapijeer* sebagai mata pelajaran yang perlu dikurangi alokasi waktunya.

Denmark merupakan negara dengan sistem pendidikan yang tersentralisasi. Menteri pendidikan bertugas untuk menerbitkan panduan kurikulum yang bersifat tidak mengikat sekolah dasar, namun wajib untuk ditaati oleh sekolah menengah. Di antara kelima negara yang diteliti di dalam penelitian ini, Denmark merupakan negara yang paling menekankan nilai individualisme, namun tetap memiliki rasa keterikatan yang kuat sebagai sebuah kelompok. Salah satu keunikan dari negara ini adalah fakta bahwa para siswa memiliki teman sekelas dan wali kelas yang sama selama sembilan tahun pertama mereka sekolah. Sejarah bangsa Denmark, geografi, pendidikan agama Kristen (berdasarkan prinsip Gereja Luther Denmark) serta bahasa Denmark, diajarkan selama sembilan tahun. Pada kelas tujuh, para siswa mulai diberikan mata pelajaran kontemporer. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang membahas permasalahan tertentu, di mana siswa dapat menentukan sendiri topik-topik yang akan dikaji. Salah satu contoh permasalahan yang dibahas oleh para siswa di tingkat sembilan pada tahun 1987 adalah kekerasan video dan kultur remaja. Pada tingkat akhir pendidikan menengah, hubungan antara blok Barat dan Timur, serta perkembangan ekonomi di negara-negara ketiga sering menjadi topik bahasan mata pelajaran kontemporer.

Pada umumnya diskusi-diskusi kelas mengenai berbagai persoalan nilai yang bersifat kontroversial di sekolah-sekolah di Denmark merupakan sesuatu yang dapat diterima dan biasanya ditemukan hampir di seluruh mata pelajaran.

Tujuan utama dari *Folkeskole* (sekolah kelas 1-9 atau 10) seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1975 adalah “memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk memperoleh pengetahuan, keahlian dan metode kerja, serta berbagai cara untuk mengekspresikan diri mereka sendiri... untuk menciptakan kesempatan bagi pengalaman dan eksplorasi diri yang memungkinkan siswa untuk... mengembangkan kemampuannya dalam membuat penilaian dan evaluasi yang independen serta untuk membentuk opini” (Departemen Pendidikan Denmark, 1983). *Klassens-times* atau pertemuan kelas yang merupakan tempat bagi para siswa untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang terdapat di kelas, berbagai permasalahan yang berhubungan dengan dewan siswa (Osis) maupun membicarakan rencana pesta kelas ataupun perjalanan / karya wisata tahunan, dilaksanakan satu minggu sekali. Memberanikan siswa untuk mengemukakan pendapatnya dalam diskusi kelas yang terbuka, merupakan salah satu tujuan dari mata pelajaran seperti mata pelajaran / studi kontemporer.

Di Denmark, dewan siswa (Osis) serta pengurus kelas nampaknya memiliki kekuasaan yang besar. Hukum Sekolah di Denmark menyatakan bahwa tujuan dari sekolah adalah untuk mengajarkan demokrasi melalui berbagai praktek dalam pembuatan keputusan dan tanggung jawab. Selain dewan siswa yang aktif dan para guru yang terlibat dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah, para siswa dan guru di Denmark juga dapat memilih anggota dari dewan sekolah, di mana kepala sekolah dan perwakilan orang tua berkedudukan sebagai anggota. Hal ini sangatlah berbeda dengan keadaan di negara-negara lainnya, di mana kepala sekolah (ataupun kepala sekolah wanita) di Inggris, atau direktur sekolah di Jerman Barat memiliki kekuasaan penuh dalam pengambilan keputusan. Struktur kekuasaan diterapkan dengan cara lain. Para siswa di Denmark memanggil guru mereka dengan nama depannya, sementara di negara lain para guru dan tenaga administrasi disapa secara formal.

Swedia memiliki sistem pendidikan yang tersentralisasi, di mana Badan Pendidikan Nasional, setelah berkonsultasi dengan para pendidik, politikus dan kelompok masyarakat, merumuskan tujuan dan panduan kurikulum serta silabus untuk masing-masing mata pelajaran yang disesuaikan dengan tujuan dari kurikulum umum yang telah disetujui oleh parlemen. Dokumen-dokumen ini

kemudian dikirimkan ke sekolah-sekolah bersama dengan bahan-bahan yang berisi saran / panduan pengimplementasian. Kurikulum baru yang berlaku bagi sekolah komprehensif dirumuskan pada tahun 1980.

Kurikulum di Swedia mengharuskan diadakannya sebuah pertemuan formal mingguan bagi pengurus kelas (termasuk seluruh anggota pengurus kelas, dengan kursi yang dirancang sedemikian rupa, dilengkapi dengan sekretaris, anggota parlemen dan notulen), yang diadakan di setiap tingkat. Kegiatan ini merupakan sebuah latihan praktek proses demokrasi kelompok, dan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan di Swedia, karena kecenderungan masyarakatnya sangat menghargai konsultasi kelompok dalam pemecahan berbagai permasalahan. Diskusi yang melibatkan pengurus / dewan kelas pada kelas tingkat awal, yakni kelas dengan siswa yang baru berusia tujuh sampai dengan sepuluh tahun, dapat digunakan sebagai salah satu cara bagi guru untuk membangun semangat kelompok dalam diri siswa. Pengurus / Dewan ini membahas berbagai persoalan seperti penggalangan dana untuk penanaman pohon di Etopia, hingga ketidaksepakatan dengan peraturan sekolah. Pada diskusi di tingkat pertama kelas akan dibagi ke dalam dua kelompok yang terdiri dari dua belas hingga lima belas orang, persoalan moral yang akan dibahas dipilih dari sumber bacaan yang dibacakan di depan kelas.

Perhatian utama akan nilai secara jelas tercantum dalam silabus ilmu sosial, dan khususnya dalam mata pelajaran yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan, yang merupakan salah satu mata pelajaran orientasi yang diajarkan selama satu hingga tiga jam per minggu pada kelas tujuh hingga kelas sembilan. Pada tingkat sekolah terdapat fleksibilitas dalam penerapan kurikulum, semenjak setiap sekolah dapat menentukan jadwalnya sendiri yang disesuaikan dengan silabus serta dapat menentukan topik –topik tertentu. Meskipun tidak terdapat ujian nasional dan sedikitnya jumlah pengawas sekolah, namun sekolah-sekolah di Swedia tetap taat terhadap kurikulum pusat.

Kurikulum 1980 secara jelas mencantumkan jumlah nilai yang wajib diajarkan oleh sekolah. Sebagai contoh, “Perintah harus dapat membantu menanamkan pemahaman terhadap orang lain dan kondisi dirinya sendiri pada diri setiap siswa, sebagai dasar tumbuhnya rasa keadilan dan solidaritas”.

Keadilan dan solidaritas merupakan aspek penting dari organisasi sekolah dan dari pengajaran nilai di kelas. Beberapa bagian kurikulum membahas berbagai mata pelajaran yang berhubungan dengan keagamaan, yang wajib diberikan di setiap tingkat / jenjang pendidikan. Secara umum, keyakinan penganut ajaran *Luther* mengenai sifat dasar umat manusia dan masyarakat merupakan sumber sejarah / dasar dari ilmu-ilmu yang kini diajarkan dalam ilmu pengetahuan sosial. Sejak tahun 1919 kurikulum tidak lagi memuat ajaran *Luther* maupun katekismus dalam bidang keagamaan (mata pelajaran agama). Dalam pendidikan agama, kurikulum 1980 menyebutkan; “sekolah bertujuan membantu siswa dalam merenungkan berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan dan makna yang terkandung dibalikinya... dan (memberikan) pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai agama Kristen” (Dewan Pendidikan Nasional Swedia, 1980a, pp. 7 dan 9).

Perdebatan sengit mewarnai perumusan kurikulum 1980, khususnya perubahan dalam pendidikan agama (mata pelajaran dengan penekanan akan perbandingan agama dan berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan eksistensi). Perubahan mendasar lainnya yang terdapat dalam kurikulum 1980 adalah anjuran mengenai pengajaran konflik dan permasalahan kontroversial sebagai persiapan bagi kewarganegaraan dalam demokrasi. Kurikulum 1969 menyatakan secara tegas mengenai keobjektifan dan kenetralan dari pengajaran ilmu pengetahuan sosial yang berbasis ilmu, sehingga para guru menghindari penyelenggaraan diskusi kelas mengenai persoalan yang bersifat kontroversial. Sebaliknya, dalam kurikulum 1980 tercantum:

Secara netral dan empiris menuntut agar masyarakat tidak digambarkan sebagai sesuatu yang harmonis dan terbebas dari konflik. Sebaliknya, sangatlah penting bagi anak-anak untuk menyadari hubungan antara konflik individu, sosial dan nasional, dan pada sisi lain, juga menyadari adanya agresi, kekerasan dan peperangan. Sekolah harus membuat siswanya menyadari adanya manusia yang hidup dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda dengan dirinya, karena hal ini dapat mengurangi sikap antipati terhadap kelompok yang berbeda. Berbagai diskusi mengenai konflik dan pemecahannya Diterapkan dalam

pengajaran seluruh mata pelajaran, pada pertemuan komite kelas, serta konteks lainnya yang melibatkan diskusi mengenai hubungan antar umat manusia (Dewan Pendidikan Nasional Swedia, 1980b, pp. 25).

Sebagai akibat dari pernyataan seperti di atas yang tercantum di dalam kurikulum, maka para guru merasa memiliki izin untuk mengadakan diskusi kelas mengenai persoalan yang bersifat kontroversial, meskipun mereka dituntut mampu memberikan pembahasan yang berimbang (adil). Namun bagaimanapun juga, banyak guru, terutama mereka yang dilatih untuk mengajarkan mata pelajaran yang bersifat teoritis bagi siswa di tingkat 7-9, tidak begitu memperhatikan berbagai persoalan kontroversial serta sedikit sekali mendiskusikan berbagai konflik yang terjadi, dibanding yang mereka lakukan sebelum tahun 1980. Penanaman rasa kebersamaan sebagai salah satu cara dalam menengahi dan meleraikan konflik masih perlu ditingkatkan.

Meskipun kurikulum mencantumkan: “bahan ajaran yang dicetak haruslah mendorong lahirnya kaya tulis dan dapat mengundang perdebatan yang kritis.”, namun seri buku paket yang digunakan di sekolah-sekolah di Swedia tidak dapat secara efektif merealisasikan aturan kurikulum tersebut. Buku-buku tersebut menitikberatkan pendeskripsian materi dalam teks bacaannya, sementara pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di akhir bab berfungsi untuk mengumpulkan kembali informasi yang terdapat di dalam teks, bukan berfungsi untuk mendorong diadakannya diskusi mengenai persoalan-persoalan yang aktual.

Sebuah kurikulum baru bagi sekolah menengah tingkat akhir sedang dikembangkan dan sedang diperdebatkan sejak tahun 1981. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan dan minat awal mereka melalui berbagai diskusi mengenai persoalan kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai stimulus bagi proses pencarian dan analisis berbagai informasi faktual dari berbagai sumber serta pemahaman akan nilai yang dianut oleh berbagai kelompok, dan aksi.

Program-program tertentu dari kelima negara ini membantu menjelaskan mengenai pengaruh sekolah terhadap nilai yang dianut oleh para siswa, cara sekolah membuat keputusan secara umum, serta dampak yang ditimbulkan dalam

konteks politik, sosial dan keagamaan, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Pada kenyataannya, selain terdapat kesamaan dalam pendidikan nilai, kelima negara ini juga memiliki keunikan tersendiri yang dapat membantu menjelaskan alasan dari perbedaan tingkat perubahan minat dalam pendidikan nilai pada masing-masing negara.

H. Pembaharuan Minat Terhadap Pendidikan Nilai

Pada tahun 1980an terdapat pembaharuan minat dalam bidang pendidikan nilai yang terjadi di Inggris, Jerman Barat, Belanda dan Denmark, serta dalam hal tertentu terjadi juga di Swedia. Beberapa kelompok menyatakan pembaharuan minat ini dikarenakan banyaknya kekurangan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga pada akhirnya menimbulkan demonstrasi siswa di tahun 1960an. Kelompok ini menyatakan keinginannya untuk kembali memperhatikan mata pelajaran seperti bahasa nasional, sejarah dan matematika. Kondisi di kelima negara yang terus-menerus menjadi tempat tujuan para imigran yang berasal dari bangsa-bangsa di luar kawasan Eropa Utara, menyebabkan perlunya perhatian yang lebih terhadap perbedaan dalam nilai keagamaan, politik dan ekonomi. Berkuasanya para politikus konservatif telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat untuk kembali kepada nilai-nilai tradisional yang berhubungan dengan kebudayaan yang lebih homogen yang pernah berlaku di masa lalu. Para politikus yang lebih konservatif ini mendapatkan kedudukan sebagai pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan, sehingga pada akhirnya nilai-nilai tradisional pun kembali diberlakukan.

Di Inggris, dorongan akan adanya pembaharuan minat dalam bidang pendidikan nilai muncul pada pertengahan tahun 70an melalui sejumlah publikasi dari Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (DES / *Departement of Education and Science*) yang mengulas dan mengkaji ulang kurikulum sekolah. Pendidikan nilai menjadi salah satu topik yang di bahas pada acara debat mengenai persoalan pendidikan yang diadakan oleh Perdana Menteri *Callaghan* pada tahun 1976, dan kemudian diteruskan oleh Perdana Menteri *Thatcher*. Pada acara ini banyak pihak menyampaikan kepedulian akan peran Inggris dalam bidang pendidikan di Eropa dan di dunia, dan juga akan pengaruh dari media

masa terhadap identitas dan warisan budaya (Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, 1977, 1979, 1980a, 1980b, 1981; Inspektorat Kerajaan, 1977).

Pada tahun-tahun pertama perdebatan, para politikus dipanggil untuk memberikan pendidikan politik, namun akhir-akhir ini pelaksanaannya semakin berkurang. Pergerakan pendidikan politik di tahun 1970an muncul sebagai akibat dari kepedulian akan kurangnya kesadaran politik dari para lulusan. Hal tersebut menekankan perlu dikembangkannya “kesadaran politik”, yang didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai politik di dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep-konsep politik, seperti kekuasaan, kemerdekaan dan otoritas, serta mendukung nilai-nilai demokratis yang bersifat prosedural, seperti kebebasan, toleransi, keadilan serta rasa hormat akan kebenaran dan kelayakan fakta. Pendukung dari gerakan pendidikan politik di tahun 1970an berpendapat bahwa mata pelajaran yang bersifat tradisional, seperti sejarah, tidak efektif dalam meningkatkan pengetahuan sosial para remaja, karena mata pelajaran yang membahas mengenai konstitusi Inggris hanya diminati oleh sedikit siswa (*Heater*, 1969; *Stradling* 1975; *Crick* dan *Lister*, 1978; *Crick* dan *Porter*, 1978). Pada tahun 1970an para politikus dari kedua partai politik mayoritas bergabung dalam penetapan kebijakan pendidikan untuk membantu tugas Asosiasi Politik dalam mempromosikan kesadaran politik. Inspektorat Kerajaan secara resmi memberikan dukungan terhadap pergerakan yang terjadi di tahun 1977 ini, yakni dengan merekomendasikan “kompetensi politik” sebagai salah satu tujuan kurikulum yang termuat dalam Kurikulum 11-16. Minat terhadap pendidikan politik mencapai puncaknya pada tahun 1980. Melalui sebuah survei nasional, terungkap bahwa mayoritas sekolah di Inggris mengajarkan mata pelajaran yang memuat isu-isu politik dan sosial yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran umum yang tidak diujikan, mata pelajaran ini berjudul, studi umum, studi sosial, pendidikan sosial atau pendidikan sosial dan vokasional (*Stradling* dan *Noctor*, 1986).

Pada tahun 1980 minat terhadap pendidikan sosial di Inggris berubah menjadi usaha-usaha untuk mempromosikan studi mengenai persoalan global (dunia), pendidikan di negara-negara berkembang, pendidikan multikultural dan anti rasisme, pendidikan perdamaian, pendidikan lingkungan serta pendidikan

hak-hak manusia. Semua studi di atas mengajarkan nilai secara eksplisit (Lister, 1986). Perundang-undangan baru (*New Right*) di Inggris menuntut agar pendidikan perdamaian berubah kembali menjadi “pendidikan ketenteraman (*appeasement education*)” (Heater, 1986).

Golongan konservatif di Inggris menuntut diberlakukannya kembali “nilai-nilai Victorian”, seperti berfungsinya kembali keluarga sebagai tempat diberlakukannya pendisiplinan berbagai kode moral seperti perilaku, patriotisme, rendah hati, tradisi, etos kerja kaum Protestan, bekerja keras, sifat berhemat dan sifat-sifat umat kristiani. Di samping itu terdapat juga kepedulian untuk meningkatkan perekonomian melalui kerja keras dan semangat kewirausahaan. Pada masa terjadinya pemotongan anggaran besar-besaran dari Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, subsidi pemerintah untuk sekolah-sekolah tetap mengalir melalui Departemen Ketenagakerjaan yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan tenaga kerja, serta pendidikan teknik dan vokasional. Tujuan utama dari program pendidikan vokasional adalah untuk menanamkan berbagai nilai dalam diri anak muda, seperti tepat waktu, kedisiplinan, rasa bangga karena melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan bekerja keras.

Pendidikan nilai juga menjadi sebuah tema yang diperdebatkan di Inggris, dengan penekanannya terhadap penerapan pendidikan agama (*RE/religious education*) pada masyarakat yang multikultural. Mayoritas materi pendidikan agama di sekolah dasar masih diisi oleh berbagai kisah yang terdapat di dalam alkitab, dan forum diskusi yang membahas kandungan dari alkitab. Di tingkat pendidikan menengah, pendidikan agama membahas mengenai posisi umat Kristiani dalam berbagai persoalan sosial. Namun, beberapa guru bidang studi (yang mengajarkan agama), khususnya di sekolah-sekolah dengan banyak siswa yang berasal dari kaum imigran, mengadakan perubahan dalam arah pengajaran agama dari ajaran kaum gereja Anglikan menjadi pendekatan perbandingan agama. Namun banyak pihak yang tidak setuju dengan usaha ini. Beberapa orang tua muslim dan yahudi merasa bahwa pelajaran agama yang bersifat multi keyakinan tidak sesuai bagi anak-anak mereka, karenanya mereka menuntut diadakannya sekolah khusus bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, beberapa pihak menuntut agar sekolah mempertegas kembali pengajaran paham kaum Kristen

Anglikan pada masyarakat Inggris. Hingga kini, baik berbagai konflik mengenai nilai-nilai keagamaan maupun mengenai nilai-nilai ekonomi dan politik menjadi bahan perdebatan dalam penetapan kurikulum sekolah. Perbedaan pandangan tampak semakin jelas dalam kurikulum nasional yang dirumuskan pada tahun 1987, yang dapat diterapkan di sekolah dengan komunitas yang beragam.

Pendapat yang sama mengenai pendidikan nilai ditemukan pula di Belanda dalam konteks “polarisasi” yang hanya terapat di Belanda. Polarisasi merupakan sebuah tradisi yang menjadikan keragaman keagamaan masyarakat Belanda sebagai landasan dalam pengorganisasian pendidikan. Di Belanda terdapat berbagai jenis sekolah negeri yang berupa sekolah Protestan, Katolik maupun sekolah yang tidak ada hubungannya dengan agama tertentu, di mana setiap sekolah memiliki dewan sekolah, perhimpunan guru-guru, institut pelatihan guru, serta pusat pengembangan kurikulum, sehingga nilai-nilai ajaran agama katolik dapat diajarkan melalui kurikulum formal dan informal di sekolah-sekolah Katolik, dan berbagai nilai ajaran agama Protestan dapat tetap diajarkan pada sekolah-sekolah Protestan. Dalam prakteknya, para pendidik melaporkan bahwa terdapat sedikit perbedaan dalam pendekatan pengajaran nilai dikarenakan masyarakat pada masa kini yang bersifat sekuler (Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, 1986; *Hooghof*, 1987). Polarisasi dalam bidang pendidikan ini dapat mengurangi berbagai tekanan mengenai pendidikan nilai di Belanda, namun pada dasarnya hal ini tidak dapat mengurangi kekhawatiran yang ada. Belanda sedang mempertimbangkan persoalan polarisasi baru bagi agama yahudi, yakni untuk mendirikan sekolah negeri yang berupa sekolah yahudi.

Selain itu, di Belanda beberapa politikus yang beragama katolik dan Protestan dimintai bantuan untuk mempertegas kembali nilai-nilai denominasional (yang berhubungan dengan agama tertentu) sebagai salah satu cara untuk mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan seperti kriminalitas, penyalahgunaan obat-obatan, bunuh diri dan kekerasan. Para orang tua mengungkapkan kekhawatirannya akan menurunnya rasa hormat dan sopan santun pada diri anak-anak mereka. Di samping itu, terdapat pula pembaharuan minat para ahli dalam pendidikan nilai. Pusat Inovasi Katolik (FPC / *The Catholic Innovations Centre*) telah mengembangkan sebuah kurikulum pendidikan nilai

yang baru yang membahas tema-tema masa depan seperti buruh / tenaga kerja dan gender. Program ini mengadaptasi program-program yang dicetuskan oleh *Van der Ven* dari universitas Nimegen (Katolik) mengenai “Pengomunikasian nilai-nilai”, yang direalisasikan dalam bentuk dialog mengenai berbagai nilai. Pendekatan teoritis dalam pendidikan nilai ini bersifat tidak terlalu individualistis dibandingkan dengan pendekatan yang dicetuskan oleh *Raths* dan kawan-kawan dalam sebuah tulisan yang berjudul “Klarifikasi Nilai-Nilai”.

Di Belanda, seperti juga di negara-negara lain tempat diselenggarakannya penelitian ini, terapat kepedulian di kalangan publik mengenai pendidikan nilai dalam hubungannya dengan para imigran dan pengungsi, yakni kepedulian untuk memberikan pengajaran mengenai “dasar-dasar” bahasa, sejarah serta ideologi nasional. Di beberapa wilayah di Amsterdam dan Rotterdam, 70 persen dari penduduknya adalah pendatang (imigran dan pengungsi). Partai-partai politik konservatif baru bereaksi terhadap meningkatnya jumlah imigran, yakni dengan memberikan perhatian yang lebih kepada identitas nasional dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Para politikus dan orang tua bereaksi menentang proses pendidikan yang populer pada tahun 1960 dan 1970an. Mereka ingin kembali kepada penekanan pengajaran berbasis fakta pada mata pelajaran sejarah dan geografi, serta menjadikan bahasa dan matematika sebagai mata pelajaran dasar (wajib). Terdapat persoalan lain, sama dengan persoalan yang terjadi di Inggris, yakni pergerakan anti rasisme serta berbagai usaha yang berhubungan dengan hal tersebut dianggap oleh beberapa warga negara Belanda yang konservatif sebagai sesuatu yang beraliran kiri. Bagaimanapun juga, para pendidik melaporkan bahwa pada masa kini para siswa tidak begitu tertarik untuk bergabung dengan pergerakan sosial, namun lebih mementingkan cara untuk mendapatkan pekerjaan.

Debat publik dan debat politik tidak mengungkap persoalan-persoalan yang terjadi secara keseluruhan. Berbagai pandangan konservatif muncul di luar lingkaran pendidikan, sementara pernyataan yang bersifat lebih liberal muncul di forum diskusi para ahli, hal ini mengakibatkan terjadinya perkembangan kurikulum serta perkembangan dalam implementasi pendidikan lingkungan, pendidikan interkultural serta dimensi pendidikan di kawasan Eropa.

Di Jerman Barat, kesuksesan dalam bidang politik yang dicapai oleh partai politik konservatif terjadi seiring dengan meningkatnya minat dalam pengajaran berbagai nilai tradisional. Di Jerman Barat, seperti juga di negara-negara lainnya, beberapa kelompok merasa terganggu oleh kelonggaran dan pergeseran dalam proses pendidikan yang terjadi pada tahun 1960 dan 1970an. Pada masa itu muncul tuntutan diberlakukannya kembali pengajaran matematika serta sejarah dan geografi yang berbasis kejermanan. Beberapa kelompok menginginkan agar bahasa Latin mendapatkan tempat yang penting di dalam kurikulum. Beberapa pakar pendidikan Jerman pada tahun 1980an memasukan studi global (dunia), serta pendidikan perdamaian dan lingkungan ke dalam proses pengajaran, namun hal ini menuai kritik dari berbagai pihak. Di negara bagian Hessen, mata pelajaran yang membahas mengenai persoalan-persoalan kontemporer bagi siswa usia 16-19 tahun digantikan oleh mata pelajaran mengenai kronologis sejarah. Pengaruh yang dimiliki oleh teoretikus kritikal aliran kiri terhadap beberapa bagian dari kurikulum studi sosial yang berlaku di Jerman pada tahun 1970an, berakhir pada tahun 1987.

Di Jerman Barat, seperti juga di negara-negara lainnya, terdapat kekhawatiran mengenai masalah pengangguran dan imigran. Program-program baru telah dikembangkan bagi persiapan pendidikan vokasional. Para pekerja asing yang berasal dari Turki yang didatangkan ke Jerman guna mengatasi persoalan kekurangan tenaga kerja yang terjadi pada tahun 1950an, tidak meninggalkan Jerman meskipun angka pengangguran di Jerman mengalami peningkatan pada tahun 1980an. Di beberapa daerah, anak-anak dari para pekerja ini berhasil berintegrasi ke dalam masyarakat Jerman di banding di daerah lainnya. Kekhawatiran semakin bertambah ketika terjadi peningkatan dalam jumlah pengungsi yang berasal dari Jerman Timur, yang masuk ke Jerman Barat melalui Berlin.

Pengaruh yang dimiliki oleh Partai Hijau terhadap remaja, serta berbagai aksi menentang peluru kendali nuklir, di sisi lain menimbulkan kekhawatiran baru akan nilai-nilai yang dianut oleh generasi muda Jerman, karena pada dasarnya nilai-nilai diperoleh lebih banyak dari lingkungan / pergaulan remaja ataupun media masa dibandingkan dari lingkungan sekolah dan keluarga. Pada waktu yang

bersamaan, jumlah siswa sekolah menengah tingkat akhir yang memilih mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran pilihan, mengalami peningkatan.

Di Denmark juga terjadi kebangkitan minat dalam bidang pendidikan nilai yang terjadi pada tahun 1980an, bersamaan waktunya dengan berkuasanya partai koalisi konservatif di pemerintahan. Departemen Pendidikan diperintahkan untuk kembali mengajarkan nilai-nilai tradisional yang berhubungan dengan “harga diri bangsa Denmark”. Sedangkan undang-undang sekolah yang berlaku telah terlebih dahulu menyerukan kembalinya pengajaran yang “mendasar” (sesuai dengan kebudayaan bangsa Denmark). Hal ini mengakibatkan para guru di sekolah-sekolah melakukan perubahan dalam pengajaran bahasa dan sejarah Denmark. Para guru dan orang tua mempertanyakan perubahan yang tidak terstruktur yang terjadi di tahun 1960an. Baru-baru ini, undang-undang pedagogis yang berlaku di Denmark menegaskan bahwa anak-anak memerlukan lebih banyak lagi strukturisasi. Namun, hal itu akan menyebabkan terjadinya penyusutan / pengurangan partisipasi siswa dalam kegiatan pengambilan keputusan di sekolah maupun dalam diskusi terbuka mengenai persoalan-persoalan kontroversial yang merupakan karakteristik dari sekolah-sekolah di Denmark (Departemen Pendidikan Denmark, 1983).

Di Swedia, setelah berkuasanya partai Sosial Demokrat selama tiga puluh tahun berturut-turut, maka tahun 1976-1982 merupakan era berkuasanya koalisi partai konservatif. Namun, dengan berubahnya partai yang berkuasa tidak terdapat perubahan yang berhubungan dengan persoalan nilai, terutama dikarenakan tradisi konsultasi di Swedia yang melibatkan seluruh partai yang berkepentingan, dan merupakan sebuah kegiatan yang menghabiskan waktu. Pada akhir tahun 1970, muncul kekhawatiran mengenai siswa yang putus sekolah dan apatis terhadap pendidikan, perkelahian pelajar, vandalisme dan berkurangnya prestasi siswa dalam belajar. Beberapa pihak berpendapat bahwa reformasi sekolah yang terjadi pada tahun 1960 sudah di luar jalur. Pada tahun 1978 dibentuk sebuah kelompok studi untuk meneliti persoalan Formasi dan Penyebaran Standar Moral di lingkungan Sekolah yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai cara yang digunakan oleh sekolah dalam “menyebarkan standar fundamental dari hubungan antar manusia yang dapat digambarkan sebagai sebuah ... persamaan

yang hampir mirip dengan pendidikan“ (Kelompok Studi Formasi dan Penyebaran Standar Moral di lingkungan Sekolah, 1979, p. 5). Kelompok studi ini beranggotakan perwakilan dari kelompok orang tua, murid, guru, pengurus administrasi sekolah serta Badan Pendidikan Nasional. Tujuan dari kelompok ini adalah mendorong terselenggaranya berbagai perdebatan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan generasi muda, dan secara eksplisit menolak anggapan bahwa mereka menyerahkan pembentukan moral anak-anaknya kepada negara.

Media cetak menjadi sarana yang dipilih oleh para pakar pendidikan, dan sebuah buklet setebal lima puluh tiga halaman diterbitkan pada tahun 1979 dengan judul *Skolan Skall Fostra: En Debattskrift* (Sekolah Dapat Menjadi Media Pendidikan: Sebuah Buku Panduan Debat. Buku terjemahan berbahasa Inggris berjudul Sekolah dan Pendidikan). Buklet ini dikemas secara menarik dan disertai dengan kartun sebagai ilustrasinya. Buklet ini didistribusikan ke seluruh pelosok Swedia dan menjadi bahan perbincangan, bukan saja di kalangan orang tua dan guru, melainkan juga dikalangan personil sekolah, seperti penjaga sekolah dan petugas kantin.

Buku ini memuat sederet nilai yang dianggap penting dalam demokrasi: toleransi, persamaan hak, rasa hormat akan kebenaran, keadilan serta martabat manusia. Sekolah haruslah berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai ini guna mempertahankan eksistensi nilai-nilai tersebut, serta demi kelangsungan hidup manusia / masyarakat:

Banyak sekali terdapat poin-poin penting yang berhubungan dengan nilai-nilai yang telah kita sepakati di negara ini. Terdapat beberapa hal yang bisa kita anggap benar dan pantas tanpa harus mengorbankan kemerdekaan orang lain... sama dengan aturan main dari seluruh partai politik dan juga dengan keyakinan dari berbagai agama serta filosofi. Merupakan tugas bagi seluruh orang dewasa baik di rumah maupun di sekolah untuk menjelaskan dan mendemonstrasikan nilai-nilai ini kepada para remaja... Sekolah haruslah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam memberikan kapasitas moral bagi siswa untuk memperhatikan dan memahami

kepentingan orang lain dan selalu mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam melakukan sesuatu... Sekolah haruslah memberikan pendidikan kepada siswanya (Kelompok Studi Formasi dan Penyebaran Standar Moral di Lingkungan Sekolah, 1979, p. 10).

Laporan di atas menjelaskan bahwa meskipun setiap siswa memiliki kebebasan dalam mengeksplorasi berbagai nilai, namun relativisme (sebuah paham yang beranggapan bahwa semua nilai itu sama) tidak dapat diterima.

Beberapa contoh yang dikutip di dalam laporan hasil penelitian kelompok tersebut mengkaji persoalan para imigran, baik mengenai permasalahan mereka dalam proses penyesuaian diri, maupun persoalan munculnya tradisi dan kebudayaan yang berbeda dalam masyarakat Swedia.

Beberapa imigran mungkin menganut nilai-nilai... yang mungkin sangat tidak sesuai dengan salah satu nilai yang paling fundamental yang berlaku di dalam masyarakat kita, contohnya persamaan hak antara pria dan wanita. Dalam kasus ini, pengajaran di dalam kelas haruslah dilangsungkan sesuai dengan pandangan kita, meskipun hal ini akan bertentangan dengan pendapat dari beberapa siswa dan keluarganya (Kelompok Studi Formasi dan Penyebaran Standar Moral di Lingkungan Sekolah, 1979, p. 10).

Hasil dari penelitian juga menganjurkan agar sekolah “menolak” pandangan / pendapat minoritas dari kaum imigran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Swedia, guna kepentingan dari siswa bangsa Swedia.

Untuk mendorong penerapan ide-ide di atas di kelas-kelas, serangkaian buku paket diterbitkan oleh Departemen Pendidikan pada tahun 1980. Hampir sepuluh tahun setelah dipublikasikannya hasil temuan dari kelompok studi, sebagian guru menggunakan buku paket tersebut sebagai acuan, namun sebagian lagi menghentikan pelaksanaan kegiatan debat kelas mengenai persoalan tersebut. Akan tetapi, terdapat juga pendidik yang berbicara dengan nada menghina

mengenai keyakinan mereka akan karakter yang bersifat otoriter yang dimiliki oleh sekolah dan pendidikan, ataupun mengenai pendapat mereka bahwa laporan dari kelompok studi haruslah dilihat sebagai sebuah dokumen yang merupakan respons terhadap konteks politik tertentu, tanpa menimbulkan efek jangka panjang.

Beberapa gagasan yang terdapat di dalam kurikulum nasional 1980 pada bagian Pendidikan dan Perkembangan memang cocok dengan apa yang tercantum dalam laporan penelitian tersebut:

Sekolah haruslah menyediakan pendidikan... dan menanamkan nilai-nilai seperti kemampuan untuk mempertahankan dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam hal toleransi, persekutuan, serta persamaan hak, di dalam diri siswanya... Oleh karena itu sekolah harus berusaha untuk menciptakan keadilan / persamaan antara pria dan wanita... Sekolah harus berusaha untuk menanamkan rasa solidaritas terhadap kelompok minoritas / yang dirugikan yang terdapat di negara ini maupun di seluruh penjuru dunia... serta tekad untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi... Semua ini berhubungan dengan semangat yang menjadi karakter dari sebuah sekolah, harapan dan tuntutan dari orang dewasa serta perkataan dan perbuatan mereka sebagai contoh (Kelompok Studi Formasi dan Penyebaran Standar Moral di Lingkungan Sekolah, 1979, p. 10).

Kurikulum sekolah komprehensif ini memperoleh suara bulat dari seluruh partai politik serta merupakan perpaduan yang menarik dari sesuatu yang disebut dengan pernyataan liberal (seperti yang dikutip pada bab sebelumnya mengenai pembahasan sebuah perspektif konflik mengenai persoalan sosial) dengan ide-ide yang bersifat lebih konservatif mengenai serangkaian nilai yang telah disepakati untuk diajarkan di setiap sekolah. Penggabungan dua unsur yang berbeda dalam sebuah konsensus merupakan sebuah contoh umum dari kebijakan pendidikan di Swedia.

Kesimpulannya, meskipun mayoritas pendidik di Swedia tidak percaya akan adanya pembaharuan minat dalam pendidikan nilai yang terjadi pada tahun 1982-1987 (masa di mana pembaharuan minat terjadi di negara-negara lain yang diteliti), namun terdapat sebuah tradisi yang melibatkan sekolah dalam penetapan nilai-nilai inti dari demokrasi dan solidaritas yang terjadi pada masa pemerintahan koalisi partai konservatif (1976-1982). Bagaimanapun juga, pengalaman bangsa Swedia menggambarkan bahwa perubahan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan nilai, sangatlah lambat dan bahwa perubahan dalam iklim politik membawa pengaruh yang relatif tidak langsung (implisit) dibanding membawa perubahan yang langsung dan segera.

Dengan mempertimbangkan imigrasi serta pengaruhnya terhadap sekolah / pendidikan di negara-negara yang diteliti, beberapa pihak berpendapat bahwa sekolah akan mulai memperhatikan kepentingan dari kaum imigran jika sudah terjadi sebuah aksi tuntutan. Beberapa organisasi yang berskala regional, seperti Badan Eropa (*Council of Europe*) terus memperhatikan dan membela kepentingan dari kebudayaan minoritas, serta merancang sebuah program pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anak kaum imigran. Melalui berbagai publikasi dan seminar, program ini mendapatkan perhatian dan bantuan dari para pendidik. Namun masih terdapat keraguan bahwa pesan / misi yang mereka bawa akan dapat diterima oleh mayoritas guru yang pada dasarnya akan berusaha untuk menekan kaum minoritas untuk membela nilai-nilai lokal. Pada waktu yang bersamaan, faktor ekonomi global eksternal mengakibatkan banyak warga dari kelima negara penelitian menjadi khawatir akan masalah pengangguran dan kompetisi dengan para imigran dalam memperoleh pekerjaan. Cepatnya perubahan serta meningkatnya pluralisme dalam masyarakat telah menciptakan kegelisahan sehingga banyak orang berusaha untuk memadukan nilai-nilai ini yang berlaku. Kompetisi ekonomi global serta pergeseran dalam pendistribusian kekuasaan dan kesejahteraan di dunia telah memperparah kegelisahan yang ada. Berbagai kritik muncul sebagai akibat dari kegelisahan serta berbagai ancaman terhadap sekolah sebagai lembaga pendidikan dikarenakan perannya dalam proses penanaman nilai pada generasi muda.

Seluruh masyarakat (di kelima negara yang diteliti) menganggap dukungan generasi muda akan nilai-nilai politik, ekonomi dan keagamaan yang terdapat dalam sistem dan tradisi, sebagai sesuatu yang penting. Sekolah dianggap memiliki fungsi pemeliharaan sistem yang esensial dalam mempertahankan nilai-nilai sosial yang sangat diperlukan oleh sistem, namun sekolah harus dapat menjalankan perannya dalam cara yang dalam beberapa aspek pentingnya mungkin berbeda dengan sistem yang berlaku di masa lalu.

I. Kesimpulan

Baik diskusi mengenai model yang membedakan antara berbagai konteks, sekolah dan keluarga, maupun deskripsi mengenai persamaan dan perbedaan tidak dapat sepenuhnya mengubah besarnya minat generasi penerus di kelima negara Eropa Utara terhadap nilai. Orang tua sangatlah peduli akan nilai-nilai yang diadopsi oleh anak-anak mereka, meskipun banyak dari orang tua yang belum memiliki kepastian mengenai nilai-nilai tertentu yang berguna bagi anak-anak mereka ketika dewasa nanti, dan juga belum memiliki kepastian mengenai cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Model yang ditampilkan dalam penelitian ini merupakan model yang dinamis, hal ini dikarenakan mayoritas energi atau pun kekuatan motif berasal dari kepedulian orang tua. Mayoritas orang tua pada dasarnya mengetahui bidang-bidang tertentu di mana nilai-nilai yang dianut oleh anak mereka sama dengan nilai yang mereka anut, serta bidang-bidang lainnya dengan perbedaan besar dalam nilai yang mereka anut (antara nilai yang dianut oleh orang tua dan anak). Beberapa orang tua di Eropa Utara menganggap usaha untuk membesarkan anak disertai dengan penanaman serangkaian nilai-nilai sosial pada diri anak mereka sebagai sebuah kewajiban yang berlaku di lingkungan masyarakat, dan mereka sangat peduli akan kontribusi / manfaat dari pendidikan nilai yang mereka berikan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kegagalan maupun jarak yang terjadi dalam pendidikan nilai di lingkungan rumah pada dasarnya merupakan tanggung jawab individu atau keluarga.

Ketika para pengambil kebijakan maupun pertemuan para pendidik membahas mengenai persoalan nilai di kalangan generasi muda, pada dasarnya

mereka lebih memperhatikan keinginan / minat dari masyarakat. Dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh pendidikan nilai sangat sulit untuk diukur. Data-data statistik mengenai meningkatnya kejahatan atau penyalahgunaan obat-obatan, maupun menurunnya jumlah pemilih menjadi persoalan yang sering didiskusikan. Namun penginterpretasian dari data-data statistik ini sering kali tidak seragam dan juga sering menimbulkan kesan mengusung ideologi tertentu, yakni ideologi konservatif maupun liberal. Apakah pemerintah kurang memberikan bantuan dana bagi keluarga maupun pendidikan ataukah masyarakat yang sangat bergantung akan bantuan dana dari pemerintah? Haruskah kita menyalahkan para ibu yang bekerja di luar rumah sehingga kurang memperhatikan anak-anak mereka ataukah kesalahan terletak pada kegagalan pemerintah dalam mendanai sekolah-sekolah percontohan atau pusat pengasuhan anak harian yang merupakan tempat tersedianya berbagai model nilai yang tepat untuk diterapkan?

Partai politik merupakan institusi politik yang paling sering ditemui dalam penelitian di kelima negara Eropa Utara serta di wilayah yang menyelenggarakan proses polarisasi. Banyak sekali masukan dalam bidang pendidikan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang berasal dari partai politik, seperti yang terjadi di Inggris. Di Swedia, hal seperti ini terjadi pada masa pemerintahan partai koalisi konservatif di mana pendidikan nilai menjadi topik masalah yang paling sering diperdebatkan. Bagaimanapun juga, tingkat keberhasilan sebuah program sangatlah bergantung pada adanya dua partai utama yang mendukung program tersebut atau tergantung pada kesamaan pandangan dari partai koalisi yang berkuasa.

Di kelima negara yang diteliti, terdapat kepedulian yang besar untuk menjaga agar diskusi kelas tidak mengarah kepada diskusi partisan partai politik (mengarah kepada pemberian dukungan terhadap partai politik tertentu). Namun interpretasi mengenai persoalan pendidikan nilai baik di dalam maupun di luar kelas pada umumnya sering diwarnai oleh faktor ideologi. Polarisasi serta latar belakang dari argumentasi tersebut di beberapa negara tampaknya merupakan akibat dari adanya ketimpangan waktu antara munculnya berbagai pertanyaan mengenai nilai-nilai yang dianut oleh generasi muda, implementasi dari revisi

kurikulum atau praktek pendidikan, serta fakta-fakta yang menunjukkan terjadinya sebuah perubahan. Tampaknya mayoritas sekolah belum menuntaskan persiapan kurikulum maupun pelatihan yang diperlukan guna menciptakan sebuah program yang baru, sebelum munculnya berbagai pertanyaan seputar kepedulian sekolah terhadap nilai-nilai yang dianut oleh para siswanya. *Weiler* (1983) berpendapat bahwa sering kali program-program eksperimental digunakan untuk meredam berbagai argumentasi mengenai legitimasi dari pendidikan politik.

Berbagai nilai dan institusi ekonomi membentuk sebuah konteks penting yang mendasar. Pergeseran yang baru-baru ini terjadi di Inggris, yakni pergeseran dari sosialisme menjadi sektor perusahaan swasta, turut mempengaruhi pendidikan. Eratnya persatuan kalangan pekerja pada umumnya dan para ahli pendidikan pada khususnya merupakan sesuatu yang sangat penting, seperti yang terjadi di Swedia. Minat akan berbagai nilai yang berhubungan dengan kerja, baik di negara dengan ekonomi pasar yang tinggi maupun rendah, cenderung sama. Para orang tua dan pendidik sama-sama memiliki investasi tingkat tinggi dalam melihat generasi muda menciptakan karya yang produktif dan memuaskan, yang mana menjadi perhatian luar biasa selama masa di mana terjadi tingkat pengangguran yang tinggi.

Dimensi penting ketiga dari konteks pendidikan nilai yang dilukiskan dalam model tadi adalah kekuatan dan citra negara tersebut di dunia. Tidak satu pun negara-negara ini yang merupakan negara pembangun (*nation-building*), melainkan negara yang bergulat dalam kurikulum mereka dengan persoalan seperti citra nasional mereka dan status di dunia dan bagaimana menumbuhkan rasa bangga akan warisan budaya nasional. Patriotisme nasional relatif menerima tekanan eksplisit di sekolah, mungkin karena banyak pendidik melihat sebuah garis tipis antara patriotisme dan chauvinisme nasional. Di setiap negara, bagaimana pun juga, ada harapan untuk menumbuhkan sebuah rasa bangga terhadap citra bangsa di luar negeri pada diri remaja; Swedia dan Denmark layak dilihat sebagai contoh yang pantas bagi negara berkembang dari “cara tengah” (*middle way*) dengan mengarakterisasikan politik dan masyarakat Skandinavia.

Persoalan identitas nasional telah dijadikan titik perhatian di negara ini melalui arus imigran yang tidak memiliki pengetahuan tentang warisan budaya

dan juga rasa identitas nasional. Permasalahan ini diasosiasikan dengan pernyataan tegas mengenai kebutuhan akan penanaman nilai bangsa kepada para imigran. Akan tetapi, masih terus terdapat rasa yang bertentangan (ambivalensi), contohnya: Apakah anak-anak keturunan Turki harus benar-benar didorong untuk berpikir bahwa mereka juga adalah orang Jerman atau apakah keluarga muda muslim Pakistan dapat sepenuhnya membawa identitas Inggris?

Lembaga religius di negara-negara ini merupakan sumber utama dari basis pendidikan nilai. Pendidikan agama yang diselenggarakan di sekolah biasanya tidak berhubungan dengan keimanan, dan sangat jarang dilakukan penghafalan akan teks-teks sakral. Meningkatnya pluralisme agama dalam masyarakat dalam beberapa kasus telah mengurangi persesuaian nilai yang didapat di rumah dan sekolah, dan juga telah meningkatkan perhatian tentang pendidikan agama. Di beberapa negara program-program pendidikan agama di sekolah yang cukup berhasil dikembangkan dalam konteks masyarakat dengan latar belakang agama yang homogen. Terutama jika program-program ini merespons terhadap peningkatan aktual dalam pluralisme agama dengan mengembangkan mekanisme untuk menghargai hak orang lain dalam beragama, polarisasi akut dalam pendidikan agama tampaknya berhasil dihindari. Kenyataan di beberapa negara, keberadaan pendidikan agama dalam kurikulum kelihatannya mencoba menanamkan rasa kendali dan jaminan bahwa nilai-nilai dasar yang penting bagi masyarakat manusia telah ditanamkan.

Kesimpulannya, empat dimensi kontekstual bisa dianggap sebagai batas yang mewakili, yang lebih kencang ditarik dan dipaksakan di beberapa negara atau pada beberapa saat daripada di negara lain atau waktu yang lain. Dampak eksplisit dan implisit dari empat dimensi kontekstual ini adalah dari kepentingan yang luar biasa dalam memahami pendidikan nilai di lingkungan keluarga dan sekolah.

Keluarga

Penelitian ini bukanlah merupakan penelitian mengenai keluarga, hasil penelitian di kelima negara menunjukkan peran dari keluarga terhadap pemerolehan nilai anak baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

Penelitian yang membahas mengenai keluarga dan berbagai nilai yang dianut di negara-negara Eropa Barat masih sangat jarang sekali (sebagai contoh, *Jennings dkk.*, 1979). Bagaimanapun juga, di Eropa Barat, pengaruh keluarga terhadap sekolah dalam hubungannya dengan nilai (pendidikan nilai) mulai mendapatkan perhatian, sama seperti yang terjadi di Amerika. Namun partisipasi mereka dibatasi oleh berbagai peraturan, dan mereka tidak merasa bahwa mereka memiliki kekuasaan yang lebih. Di Denmark, dewan sekolah diubah namanya menjadi dewan orang tua. Hanya pihak orang tua saja yang berhak memilih anggota dewan, namun perwakilan guru dan murid tidak memiliki hak untuk memilih. Di Inggris muncul usulan terbaru yang menyarankan pemberian kekuasaan yang lebih kepada orang tua untuk mengontrol sekolah, yakni dengan mengizinkan sekolah untuk menentukan kebijakan lokalnya sesuai dengan suara mayoritas dari para orang tua. Belumlah jelas keuntungan dan dampak yang akan ditimbulkan oleh hal ini. Tak satu pun di kelima negara ini ditemukan kelompok tertentu yang menuntut sekolah untuk mengajarkan atau tidak mengajarkan nilai-nilai tertentu.

Peran dari orang tua kaum imigran terhadap pendidikan nilai di wilayah Eropa Utara belumlah jelas. Tuntutan terhadap pihak sekolah dalam berbagai bidang yang berasal dari pihak orang tua yang mapan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan politik, akan berbeda dengan tuntutan dari generasi sebelumnya.

Sekolah

Akan tetapi, di kedua negara tersebut mata pelajaran yang ditawarkan dan isi atau waktu yang telah ditentukan dalam jadwal dinyatakan secara eksplisit dan relatif gampang diubah jika dibandingkan dengan kesulitan dalam mengubah asumsi-asumsi implisit yang mengatur interaksi siswa – guru atau menambah frekuensi diskusi terbuka tentang isu-isu kontroversial atau dilema-dilema etis.

Sekolah-sekolah di Eropa utara akan terus menyediakan beberapa bentuk pendidikan nilai bagi semua siswa, sedikit diterima dengan benar daripada halnya 15 tahun yang lalu tapi tidak membuatnya lebih diperhatikan, dibandingkan dengan yang telah dilakukan di beberapa negara lain. Sebagai contoh, mata

pelajaran atau ujian pendidikan moral yang spesifik tak mungkin akan dilembagakan.

Ideologi akan terus memiliki pengaruh penting terhadap pendidikan, sebagaimana akan selalu terjadi polarisasi antara pendekatan liberal dan konservatif dalam sekolah dan bergeser ke arah yang lebih dominan, khususnya di negara-negara yang tidak terbiasa dengan politik koalisi. Akan tetap berlangsung kewaspadaan akan ungkapan-ungkapan yang datang dari sudut pandang partisan partai. Bagaimanapun juga kelambanan sekolah akan terus mencegah terjadinya perubahan yang cepat dalam pendidikan nilai. Di beberapa negara faktor ideologi ini akan menyediakan beberapa tingkat kesulitan yang khusus bagi guru dalam persiapannya.

Beberapa pembuat kebijakan pendidikan pergi ke luar negeri demi mencari model keberhasilan dalam penanaman nilai di seluruh program sekolah. Mereka akan cenderung memberi sedikit perhatian untuk memaksa membatasi konteks politik, ekonomi atau agama. Sebaliknya, mereka yang merasa benar-benar terbatas oleh konteks ini akan menegaskan bahwa hanya sedikit yang bisa dipelajari tentang praktek pendidikan yang menjanjikan dari negara lain.

Berikut adalah beberapa pertanyaan penelitian dalam kaitannya dengan kebijakan yang patut mendapatkan perhatian yang lebih dalam:

1. Apakah titik perhatian tentang penanaman nilai kultural dominan sebagai akibat yang tak terelakkan dari migrasi besar-besaran menciptakan sebuah situasi nilai pluralistik dalam masyarakat dan di sekolah? Bagaimana fleksibilitas sekolah dalam menyerap ide-ide baru atau pengaruh kelompok bereaksi dalam proses tersebut? Pada tingkatan apakah perhatian primer ini secara lokal dan nasional?
2. Apakah masyarakat demokratis secara teratur bergeser dari perhatian dari penanaman nilai tradisional menuju nilai-nilai yang lebih terbuka (dan sebaliknya)? Bagaimana pergeseran ini diasosiasikan dengan kewenangan partai politik dalam posisi yang berbeda dari kesatuan kiri - kanan? Bagaimana pergeseran masyarakat seperti ini direfleksikan dalam sekolah yang dipengaruhi konteks sosial politis dan dalam legitimasi keterlibatan sekolah dalam pendidikan nilai?

3. Dibandingkan dengan negara yang memiliki ketetapan tentang pendidikan nilai, apakah ada perhatian yang lain tentang pendidikan nilai di negara-negara yang memiliki sedikit lembaga untuk pendidikan tersebut, seperti pelajaran dalam pendidikan moral dan agama atau sistem sekolah yang terpisah bagi mereka yang berlatar belakang agama yang berbeda?
4. Apakah perbedaan yang besar antara menerapkan kurikulum sentralisasi yang secara eksplisit memasukkan nilai sosial dan menerapkan program yang berasal dari tingkatan lokal atau program-program yang mengungkapkan nilai secara lebih implisit? Apakah penting adanya pelatihan guru bagi karakter yang berbeda? Peran apakah yang dimainkan dalam memilih buku teks atau isi kurikulum secara luas atau sempit dalam situasi yang berbeda ini?
5. Bagaimana iklim sekolah atau kelas sebagai dimensi sekolah dalam kaitannya dengan kurikulum yang lebih eksplisit? Bagaimana penyampaian isi nilai dalam kaitannya dengan cara mengajar dalam membuat keputusan dalam masyarakat demokratis?
6. Apakah model pendidikan nilai tertentu yang cocok untuk sekolah tingkat dasar tampak kurang efektif untuk digunakan pada sekolah tingkat menengah? Dugaan apa yang tepat mengenai kebutuhan akan kemampuan siswa pada usia tertentu?

Penelitian lanjutan seharusnya mengkaji konteks dan kebijakan yang berhubungan dengan berbagai faktor, minat orang tua serta ketiga dimensi sekolah (pendidikan) yang tercantum di dalam model secara bersamaan. Pengaruh kelompok sebaya dan media masa juga perlu diperhatikan. Penelitian ini akan lebih bermanfaat jika bersifat multi metode (mengggunakan berbagai metode). Survei besar-besaran mengenai perilaku siswa dapat menyediakan sebuah *benchmark* (panduan/patokan). Penelitian lintas bangsa dengan menggunakan observasi ruang kelas yang dilengkapi dengan pengujian berbagai kebijakan, wawancara dengan para pendidik dan siswa, serta pengumpulan berbagai informasi, sangat perlu untuk di lakukan. Penelitian ini menampilkan sebuah gambaran mengenai pendidikan nilai yang lebih

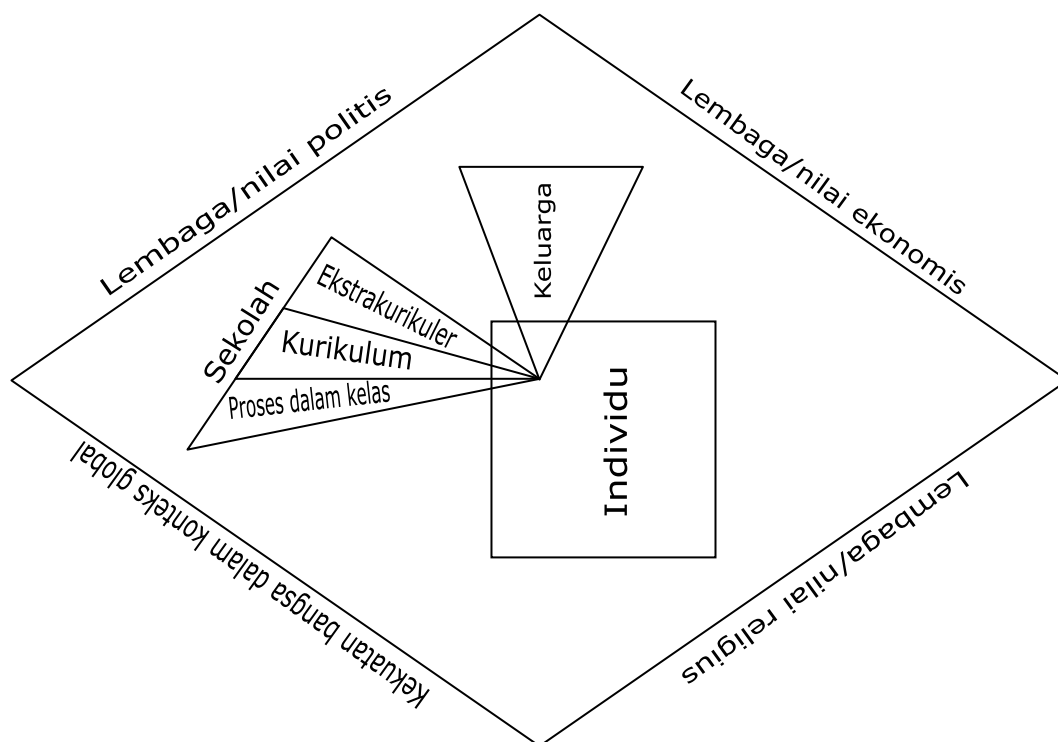
menyeluruh dan lebih kontekstual, dibanding hasil yang diperoleh dari penelitian yang menggunakan metode tunggal.

Pendidikan Nilai Dalam Tradisi Masyarakat Eropa Barat

Terdapat bermacam perangkat nilai yang dapat dipilih dalam berbagai diskusi mengenai dampak dari pendidikan terhadap nilai-nilai siswa, yang bervariasi mulai dari nilai kewarganegaraan, seperti dukungan terhadap hak pilih serta melaksanakan kewajiban untuk memilih, hingga nilai-nilai yang berhubungan dengan karakter individu. Nilai-nilai yang menghubungkan individu dengan kelompok masyarakat, sama halnya dengan nilai yang menghubungkan antar masyarakat dengan bangsa (*civic community*), merupakan hal yang dianggap sangat penting dalam tradisi masyarakat Eropa barat. Pada bab ini, pembahasa akan difokuskan pada lima negara di wilayah Eropa Utara yang sama-sama menganut tradisi ini, yakni: Denmark, Jerman Barat, Belanda, Swedia dan Inggris. Kelima negara ini dipilih karena meskipun mereka memiliki latar belakang sejarah yang sama, namun kelima negara ini menawarkan sebuah perpaduan yang menarik dari persamaan dan perbedaan mengenai pendidikan nilai dalam tradisi mereka.

Sejak masa bangsa Romawi, kaum Saxon, bangsa Viking, serta pada masa awal umat kristiani, kelima negara ini mendapatkan pengaruh dari kebudayaan yang sama, namun kelimanya tetap memiliki kekhususan / ciri khas masing-masing. Munculnya ide-ide yang memicu terjadinya Reformasi Kaum Protestan, *Renaissance*, Masa Pencerahan (*Enlightment*), serta Revolusi Industri, sangatlah berperan terhadap perkembangan nilai-nilai budaya dan institusi. Pada masa kini kelima negara tersebut memiliki kesamaan komitmen dalam mempertahankan demokrasi parlementer, yakni tetap mempertahankan ajaran agama kaum kristiani namun tetap menghormati kemajemukan agama, serta memberlakukan wajib pendidikan umum bagi semua anak hingga usia 16 tahun secara gratis. Kecuali Jerman Barat, keempat negara lainnya telah jauh lebih dulu memberikan hak kepada warga negaranya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan serta dalam memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Negara-negara ini memberikan kebebasan kepada warganya (yang sudah dewasa) untuk menentukan nilai yang dianggap penting bagi diri mereka sendiri, serta memberikan kebebasan kepada para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka sesuai dengan sistem

nilai yang mereka anut. Pada era tahun 1980an, masyarakat ini harus berjuang mengatasi permasalahan ekonomi, sosial dan politik, termasuk berjuang menghadapi demokrasi liberal yang mulai muncul di mana-mana. Selain itu, mereka juga menghadapi sebuah tantangan dalam mempersiapkan generasi muda mereka agar dapat hidup dengan layak di dalam lingkungan masyarakat global yang semakin berintegrasi; mereka cenderung menggeser nilai-nilai yang baik yang berhubungan dengan warisan kebudayaan yang mereka anut, maupun yang berhubungan dengan identitas nasional / jati diri bangsa mereka yang unik. Pada saat ini, negara-negara tersebut mulai menunjukkan minat akan peran institusi pendidikan di dalam pendidikan moral dan nilai. Selain itu, pada masyarakat Eropa barat terdapat berbagai variasi baik variasi yang berasal dari masing-masing negara, maupun antar negara. Aneka variasi ini dapat memberikan gambaran mengenai serangkaian kategori yang dapat digunakan dalam memahami pandangan mereka terhadap pendidikan, khususnya faktor-faktor yang bersifat politis. Model konseptual berikut ini pada dasarnya sangat berguna di dalam memahami pendidikan nilai dari bangsa-bangsa di dalam dan di luar Eropa.



Gambar 3.1. Pengaruh dalam pendidikan nilai

Sebuah Model / Gambaran Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai-Nilai Pendidikan

Visualisasi dari kategori-kategori yang terdapat pada sebuah model yang digunakan untuk memahami berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pandangan terhadap pendidikan nilai dapat dilihat pada gambar 3.1. Pusat dari model tersebut adalah seorang individu belia. Model ini menitik beratkan peran dari keluarga dan sekolah dalam pendidikan nilai. Ketiga unit ini ditampilkan secara luas dalam konteks kebangsaan / kultural / komunitas. Ketiga unit tersebut membatasi pengaruh yang berasal dari sekolah dan keluarga. Maksud dari ketiga kategori ini adalah untuk mengorganisasikan pembahasan mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pemerolehan nilai-nilai sosial dan kewarganegaraan pada generasi muda, serta mengatur pembahasan mengenai peran dari karakteristik individual, sekolah dan keluarga di dalam proses tersebut. Tujuan dari proses ini bukanlah untuk membuat kesimpulan bahwa faktor yang satu lebih berpengaruh di banding faktor lainnya, namun untuk menilai keseluruhan faktor secara bersamaan (sebagai sesuatu yang saling berhubungan), serta untuk mencari permasalahan-permasalahan baru yang akan dicari jalan keluarnya.

Pandangan kelima negara Eropa Utara mengenai pendidikan nilai akan digambarkan berdasarkan data-data yang dikumpulkan di Denmark, Inggris, Jerman Barat dan Belanda pada tahun 1985 - 1987, serta di Swedia pada tahun 1987. Pada bagian kesimpulan akan dibahas mengenai implikasi dari data-data tersebut serta model yang digunakan untuk menggambarkan proses penilaian pendidikan.

Keempat Dimensi Konteks

Terdapat berbagai institusi yang menjadi parameter pemerolehan nilai individu yang dihubungkan dengan kelompok sosial, masyarakat, serta bangsa (*civic community*). Keempat parameter kontekstual ini di antaranya adalah, institusi politik domestik beserta nilai-nilai yang berhubungan dengan institusi ini, institusi ekonomi beserta nilai-nilai yang relevan dengan institusi ini, institusi keagamaan dengan nilai-nilai yang merupakan bagian dari institusi ini, serta sistem

internasional. Meskipun demi tujuan pembahasan, gambar 3.1 digambarkan secara fungsional, dengan generasi muda sebagai pusatnya yang merupakan resipien dari berbagai pengaruh, namun arah dari gambar ini juga dapat “diputarbalikkan” untuk menggambarkan pengaruh dari individu terhadap sekolah, keluarga, institusi sosial, maupun konflik di antara institusi-institusi tersebut. Pembahasan pada bab ini tidak bermaksud untuk menyanggah bahwa institusi-institusi ini seharusnya menetapkan parameter, sehingga dengan bantuan parameter ini pendidikan nilai masyarakat Eropa Utara dapat dipahami secara lebih baik. Dalam banyak aspek, pengaruh dari institusi-institusi ini terhadap penilaian pendidikan (nilai pendidikan) yang terjadi di sekolah dan keluarga, serta melalui agen-agen sosialisasi lainnya, seperti media masa, lebih bersifat tidak langsung.

Bab ini pada khususnya membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh keluarga dan sekolah terhadap seluruh individu yang melewati saat-saat terpenting dari masa kanak-kanaknya atau masa remajanya dalam lingkungan tersebut (lingkungan keluarga dan sekolah). Perbedaan pada individu berdasarkan pemerolehan nilai tidaklah sebesar perbedaan yang diakibatkan oleh gender, kemampuan kognitif atau tingkat perkembangan moral seperti yang didefinisikan oleh *Kohlberg*. Gambar 3.1 memuat beberapa faktor individual penting yang dimaksud.

Keluarga

Pusat dari berbagai penelitian mengenai pengaruh dari orang tua terhadap nilai-nilai sosial atau kewarganegaraan adalah status sosio-ekonomi, tingkat pendidikan, latar belakang etnis atau imigran, serta orientasi politik (aliran kiri atau kanan) yang sering kali dihubungkan dengan keanggotaan sebuah organisasi politik. Faktor-faktor ini memiliki peran yang penting dalam proses perolehan berbagai nilai yang menghubungkan individu dengan masyarakat dan kelompok sosial – sebagai contoh nilai-nilai yang berhubungan dengan peran para pekerja dalam sistem ekonomi serta nilai-nilai yang berhubungan dengan peranan warga negara dalam sistem politik. Pengaruh dari keluarga dapat bersifat langsung dan tidak langsung.

Model-model konseptual akan sangat berguna jika model tersebut dapat menunjukkan besarnya dampak faktor-faktor demografik, seperti pendidikan

orang tua, terhadap generasi muda. Apakah orang tua dengan tingkat pendidikan yang lebih baik akan menganggap pendidikan nilai bagi anak-anak yang diberikan di lingkungan rumah jauh lebih penting dibanding mengandalkan pendidikan nilai yang dilaksanakan oleh institusi lain di luar rumah, seperti gereja atau sekolah? Apakah anak-anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua dengan tingkat pendidikan yang tinggi memperoleh kesempatan untuk mendengarkan berbagai sudut pandang dalam sebuah diskusi, atau juga memperoleh berbagai bahan bacaan yang sudah tersedia, seperti surat kabar? Apakah orang tua dengan tingkat pendidikan yang tinggi atau dengan status sosial yang tinggi lebih memiliki waktu atau sumber untuk secara aktif berpartisipasi dalam masyarakat atau untuk membahas pertimbangan-pertimbangan yang mereka ambil dalam berbagai keputusan moral yang mereka buat, sehingga akan menjadi contoh bagi anak-anak mereka? Berbagai proses ini memerlukan eksplorasi yang lebih jauh namun akan memerlukan penelitian yang bersifat lintas negara untuk meneliti perilaku orang tua, seperti halnya penelitian mengenai sekolah yang dibahas dalam bab ini.

Terdapat juga serangkaian faktor penting lainnya yang sangat jarang sekali diperhatikan dalam berbagai penelitian mengenai perilaku kewarganegaraan dan masyarakat, di antaranya latar belakang agama dan nilai yang dianut oleh keluarga, serta hubungan kedua hal tersebut dengan pendidikan nilai. Hal ini tampak sangat jelas ketika salah satu negara tempat diselenggarakannya penelitian, yakni Belanda, memisahkan pendidikan dari landasan keagamaan. Hal ini akan memunculkan pertanyaan seperti, Seberapa besar pengaruh yang harus ditanamkan oleh keluarga dalam proses pendidikan nilai yang berhubungan dengan keyakinan / agama bagi anak mereka tanpa mencari alternatif lainnya (tanpa melibatkan institusi lainnya)?

Sekolah

Peranan sekolah dalam pendidikan nilai merupakan kajian utama dari bab ini. Pada bab ini akan dibahas mengenai tiga aspek utama dari sekolah. Aspek pertama adalah isi dari kurikulum khusus dan kurikulum yang diterapkan, terutama mata pelajaran yang berhubungan dengan ilmu sosial, sejarah, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, agama dan literatur / sastra. Kurikulum

yang diajarkan mungkin akan berbeda, sesuai dengan jurusan yang diambil oleh siswa. Aspek yang kedua membahas mengenai proses di dalam kelas dan di lingkungan sekolah, termasuk juga besarnya penghargaan terhadap opini siswa, besarnya kebebasan siswa untuk tidak sependapat dengan guru serta tidak sependapat dengan cara pemaparan permasalahan dan cara mengajukan pertanyaan yang diterapkan di kelas. Aspek ini juga mencakup pengaruh dari teman sebaya terhadap perilaku siswa di lingkungan sekolah. Aktivitas ekstrakurikuler, seperti klub-klub kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswa dan kegiatan amal, merupakan dimensi ketiga yang akan di bahas dalam bab ini. Perbedaan dalam ketiga dimensi di kelima negara akan diteliti. Beberapa pertanyaan penting dalam meneliti ketiga dimensi ini di antaranya, kelompok mana sajakah yang berpartisipasi dalam pembahasan / penentuan isi kurikulum; untuk bagaimanakah keterlibatan siswa dalam berbagai kegiatan yang ada; seberapa besar dan bagaimana sekolah dipengaruhi oleh keluarga serta agen-agen sosialisasi lainnya?

Berbagai Pertanyaan dan Sumber Informasi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran dari institusi sekolah dalam pemerolehan nilai di kelima negara Eropa Utara. Empat pertanyaan berikut ini diajukan di dalam penelitian ini:

5. Kesamaan apa yang di temukan dari sekolah-sekolah di kelima negara tersebut di dalam mengajarkan nilai-nilai (pendidikan nilai)?
6. Perbedaan mendasar apakah yang terdapat dalam pendekatan yang digunakan dalam pendidikan nilai di kelima negara tersebut?
7. Apakah terdapat pembaharuan minat dalam pendidikan nilai, jika iya, apakah alasan utama dari munculnya pembaharuan minat tersebut?
8. Kebijakan dan ide-ide penelitian apa saja yang dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pendidikan nilai?

Bahan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan kombinasi dari tiga sumber data yang berbeda. Sumber yang pertama merupakan data empiris yang bersifat kuantitatif, di dalamnya termasuk Survei Pendidikan Kewarganegaraan IEA (Asosiasi internasional yang mengevaluasi

prestasi pendidikan / *International Association for the Evaluation of Educational Achievement*) dengan sampel para siswa yang berusia 14 tahun yang berasal dari kelima negara Eropa Utara (Finlandia, Jerman Barat, Irlandia, Belanda dan Swedia) yang dipilih secara random dan berstrata. Survei tersebut dilaksanakan pada tahun 1971.

Sumber data kedua lebih bersifat kualitatif dan diambil baru-baru ini. Wawancara dengan para pendidik serta observasi di ruang kelas dilaksanakan pada tahun 1985- 1987 di Inggris, Denmark, Belanda dan Jerman Barat oleh *Carole Hahn*. Para profesor dari berbagai universitas serta berbagai pihak dari keempat negara yang sebelumnya pernah menerbitkan makalah dan artikel mengenai pendidikan dan bidang sosial, dihubungi. Mereka diwawancarai serta di minta untuk memberikan informasi mengenai pihak-pihak lainnya yang mungkin dapat memberikan informasi lebih yang dapat membantu memahami permasalahan yang sedang di teliti sesuai dengan kondisi negara si nara sumber. Selain itu, semua nara sumber diminta untuk merekomendasikan sekolah-sekolah menengah serta wali kelas yang akan memberikan izin kepada seorang peneliti untuk mengamati kegiatan kelas dalam pendidikan politik dan atau sosial, serta untuk mengamati kelas-kelas lainnya dengan para siswa yang sedang berdiskusi mengenai persoalan-persoalan nilai. Di Inggris penelitian dilaksanakan di sembilan sekolah menengah, di Denmark di delapan sekolah menengah, di Belanda di tujuh sekolah menengah, dan di Jerman Barat sebanyak empat sekolah. Sekolah-sekolah ini pada umumnya berada di daerah pinggiran kota, atau di kota-kota berskala menengah. Survei ini melibatkan 1000 siswa sebagai responden untuk mengukur perilaku serta pengalaman kewarganegaraan (*civic*) mereka. Meskipun data yang terkumpul tidak secara langsung relevan dengan topik dari bab ini, namun data-data tersebut dapat memberikan pengetahuan mengenai beberapa persoalan yang di bahas dalam bab ini. Data dari survei ini diperkuat oleh berbagai artikel surat kabar serta dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh departemen pendidikan.

Sumber data ketiga berasal dari penelitian yang dilakukan di Swedia pada tahun 1987 oleh *Judith Torney-Purta*. Ia mewawancarai sekitar dua puluh pendidik yang berada di wilayah Stockholm, Uppsala, Malmo dan Gothenberg.

Para pendidik ini terdiri dari pegawai dinas pendidikan serta departemen pendidikan, maupun para ahli dari bidang teori kurikulum, pendidikan kewarganegaraan, serta pendidikan agama yang berasal dari universitas-universitas dan Fakultas Ilmu Pendidikan, serta sekelompok guru. Pada setiap sekolah yang dikunjungi penelitian dilaksanakan di dua kelas yang terdiri dari siswa yang berusia 14 tahun.

Kesamaan Tema dalam Pendidikan Nilai

Selain memiliki persamaan dalam tradisi, negara-negara Eropa Barat juga memiliki banyak kesamaan tema dalam pendidikan nilai. Di Eropa utara, nilai-nilai tidak diajarkan secara terpisah dalam mata pelajaran yang diberi judul “pendidikan moral”, seperti halnya yang terjadi di beberapa negara Asia. Sebaliknya, nilai-nilai diajarkan secara implisit dalam banyak mata pelajaran sesuai dengan etos kerja sekolah dan terkadang disebut dengan “kurikulum tersembunyi”. Mata pelajaran yang mengajarkan nilai-nilai di antaranya, agama, sejarah, ilmu sosial atau pendidikan kewarganegaraan serta literatur / sastra. Mata pelajaran lainnya yang juga dapat bermuatan pengajaran nilai namun tidak sebanyak muatan yang terdapat pada kelompok mata pelajaran di atas adalah seni, bahasa asing, geografi, ilmu pengetahuan alam dan matematika.

Pendidikan agama merupakan bagian dari kurikulum sekolah di kelima negara, namun pengajarannya tidak perlu berdurasi lama. Pada awalnya, pendidikan agama di negara-negara Eropa utara bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai yang dianut oleh kaum Kristen Judeo (*Judeo-Christian*), namun ketika negara-negara ini mendapatkan pengaruh dari kelompok agama lain, maka isi / materi dari pendidikan agama dikaji kembali. Namun pada umumnya pendidikan agama di sekolah dasar masih berhubungan dengan kisah-kisah yang terdapat di dalam Alkitab. Para guru sekolah dasar berusaha untuk mengajarkan kejujuran dan rasa hormat terhadap pihak berwajib, terhadap hukum dan terhadap individu lainnya. Nilai-nilai diajarkan melalui persepsi dan contoh; hari-hari libur, seperti hari natal dan paskah diarahkan untuk pendidikan nilai. Mata pelajaran agama di sekolah menengah mengajarkan mengenai keyakinan akan agama tertentu (sering kali berupa perbandingan dengan agama-agama lain) dan juga berupa aplikasi dari

prinsip / teori etika dalam permasalahan-permasalahan di bidang kemasyarakatan. Sebagian besar dari pendidikan nilai yang diberikan di sekolah dasar dan menengah ini beranggapan bahwa inti/ substansi dari beberapa nilai merupakan sesuatu yang dapat diajarkan, meskipun mayoritas guru mengajarkan proses pencarian jawaban dalam kehidupan serta proses pemilihan dan pengambilan keputusan dari nilai yang akan dianut.

Pengajaran nilai mungkin tidak tampak begitu jelas dalam mata pelajaran bahasa dan sejarah, namun mungkin akan lebih berpengaruh dikarenakan alokasi waktu yang dimiliki oleh kedua mata pelajaran tersebut. Bagian terpenting dari kurikulum sekolah dasar bertujuan untuk mempelajari nilai-nilai budaya dan kebangsaan melalui mata pelajaran bahasa dan sejarah nasional. Anak-anak di Inggris menghabiskan berjam-jam untuk mempelajari kebudayaan nasional serta nilai-nilai budayanya melalui mata pelajaran sejarah dan sastra Inggris. Begitu pun dengan anak-anak di Jerman Barat, Belanda, Swedia dan Denmark yang mempelajari nilai-nilai kebangsaan mereka dengan jalan mendengarkan cerita-cerita mengenai orang-orang besar yang berasal dari bangsanya yang diberikan dalam mata pelajaran bahasa, literatur / sastra dan sejarah. Di jenjang sekolah menengah, mata pelajaran tersebut tetap diberikan dan diperhatikan baik dari segi waktu maupun dengan dimasukkannya ke dalam kelompok mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional.

Sejak Perang Dunia II, mata pelajaran yang sejenis dengan mata pelajaran “studi sosial” di Amerika utara telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah menengah di kelima negara tersebut. Pada umumnya para pembuat kebijakan, para pendidik dan masyarakat sependapat akan perlu diadakannya pendidikan sosial dan kewarganegaraan, namun mereka tidak memberikan mata pelajaran tersebut status pelajaran wajib seperti halnya sejarah dan geografi. Pendidikan sosial atau pendidikan politik pada umumnya termasuk ke dalam sedikit dari mata pelajaran yang tidak diujikan, dan biasanya diajarkan dengan alokasi waktu yang sedikit. Namun meskipun terbentur dengan hal-hal tersebut, baik pendidikan sosial maupun pendidikan politik memiliki dimensi nilai yang implisit dan eksplisit yang dapat mempengaruhi banyak siswa.

Komponen-komponen lainnya dari kurikulum formal juga memiliki kontribusi terhadap pendidikan nilai. Pelajaran seni berhubungan dengan nilai-nilai estetika, sementara matematika dan ilmu alam mengajarkan nilai-nilai positif serta pentingnya kegiatan-kegiatan ilmiah. Namun pada dasarnya nilai-nilai ini bukanlah bahasan dari buku ini.

Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa isi dari kurikulum formal hanya akan efektif dalam menanamkan nilai-nilai jika iklim kelas dan iklim sekolah mendukung penerapan nilai-nilai tersebut. Hal tersebut dikarenakan dari pengalamannya dan dari model / contoh yang dilihatnya siswa dapat lebih banyak belajar dibanding dari apa yang diajarkan kepada mereka. Hal ini terbukti dalam penelitian IEA mengenai perilaku kewarganegaraan, yakni ketika siswa secara teratur berpartisipasi dalam diskusi kelas yang mendorong mereka untuk mengemukakan opini, maka mereka akan lebih memiliki pengetahuan dan minat politik serta tidak akan bersifat otoriter. Sebaliknya, siswa yang pada umumnya memperoleh pendidikan kewarganegaraannya melalui ceramah, hafalan dan ritual yang bersifat patriotik, lebih sedikit memiliki pengetahuan mengenai politik dan cenderung otoriter (*Turne dkk., 1975*). Besarnya kebebasan yang dimiliki oleh siswa sekolah menengah dalam mengembangkan dan mengekspresikan opini mereka mengenai persoalan sosial dan kewarganegaraan sangatlah penting. Peran dari pengalaman sekolah serta iklim kelas dalam pembentukan nilai yang berhubungan dengan perkembangan moral juga diilustrasikan dalam penelitian yang dilakukan oleh *Kohlberg* mengenai cara meningkatkan perkembangan moral melalui kegiatan diskusi dengan teman sebaya, khususnya di dalam tugas-tugas yang sesuai dengan konteks lingkungan sekolah (*Kohlberg dan Higgins, 1987*).

Di kelima negara Eropa Utara, tradisi demokrasi liberal memberikan kebebasan kepada warga negaranya (yang sudah dewasa) untuk mengajukan pertanyaan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi, namun pelaksanaannya di lingkungan sekolah berbeda-beda. Hasil wawancara dan observasi mengindikasikan bahwa beberapa guru berusaha mengarahkan diskusi bebas mengenai persoalan-persoalan yang kontroversial, sementara guru yang lainnya tidak, walaupun mereka menggunakan panduan kurikulum yang sama. Perbedaan jenis diskusi juga ditentukan oleh mata pelajaran yang diajarkan, usia siswa,

harapan masyarakat, serta kenyamanan guru dalam membahas permasalahan-permasalahan yang bersifat kontroversial. Diskusi terbuka mengenai persoalan kontroversial biasanya terjadi pada mata pelajaran studi sosial tingkat lanjut, mata pelajaran agama dan literatur / sastra di komunitas yang menganut nilai-nilai konstitusi liberal. Namun variabel yang paling signifikan dalam permasalahan ini adalah komitmen dari masing-masing guru untuk menyelenggarakan diskusi terbuka yang bertujuan untuk membahas dan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang kontroversial. Variabel lainnya adalah tingkat keyakinan guru akan kemampuan siswa untuk secara aktif menilai dan merefleksikan permasalahan tersebut terhadap sistem nilai yang mereka anut.

Di kelima negara yang kami teliti, para guru menyadari bahwa topik-topik tertentu sangatlah sensitif untuk dibicarakan di dalam komunitas mereka; pada umumnya para guru akan berhati-hati dengan topik-topik tersebut, bahkan beberapa guru akan memilih untuk sama sekali tidak membicarakannya di kelas. Hanya di Denmark saja mayoritas guru menyatakan bahwa mereka merasa nyaman membicarakan berbagai persoalan kontroversial bersama siswa mereka. Di Swedia, sampai dengan tahun 1980 berlaku aturan bahwa silabus nasional hanya boleh membahas persoalan yang bersifat ilmiah dan objektif serta harus bersifat netral. Struktur seperti itu cenderung menghambat guru dalam membahas persoalan-persoalan yang bersifat kontroversial. Sejak peraturan ini diadakan pada silabus / kurikulum 1980, banyak dari guru yang setuju bahwa mereka kini merasa memiliki izin untuk membahas persoalan-persoalan tersebut dalam diskusi kelasnya. Namun bagaimana pun juga, masih banyak pihak yang tidak yakini bahwa di Swedia diskusi kelas mengenai persoalan kontroversial sama banyaknya dengan diskusi-diskusi kelas yang ada di Denmark.

Dalam penelitian kami mengenai siswa sekolah menengah di keempat negara (tidak termasuk Swedia), menunjukkan bahwa para siswa di Jerman Barat merupakan kelompok yang paling setuju dengan pernyataan “di kelas kami sering mendiskusikan persoalan-persoalan kontroversial”, sedangkan para siswa di Inggris merupakan kelompok yang paling tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Namun, pada siswa di Belanda merupakan kelompok yang sangat setuju dengan pernyataan-pernyataan seperti: “Guru kami sangat menghargai pendapat kami

serta mendorong kami untuk mengemukakannya”, “di kelas ini, para siswa didorong untuk memberikan tanggapan terhadap permasalahan”, “Para siswa merasa bebas untuk secara terang-terangan tidak sependapat dengan guru mereka” dan “para guru berusaha mendorong para siswa untuk berbicara secara bebas dan terbuka di dalam kelas”. Para siswa di ketiga negara lainnya memberikan dukungan yang moderat terhadap pernyataan-pernyataan tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa para siswa menganggap ruang kelas mereka tidak terlalu kondusif bagi diselenggarakannya diskusi terbuka mengenai berbagai persoalan yang bersifat kontroversial, hal ini berbeda dengan keyakinan para guru atau dengan para pendidik di keempat negara yang menganut sistem demokrasi liberal ini.

Sarana informal lainnya di lingkungan sosial yang dapat memuat pendidikan nilai adalah melalui sistem bimbingan. Para guru, khususnya di tingkat sekolah dasar, dituntut untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para siswa, sedangkan para pembimbing di tingkat sekolah menengah diharapkan untuk mampu membantu mengatasi persoalan pribadi para siswa dan juga memberikan bimbingan karier dan pendidikan. Di Denmark, para wali kelas memegang kelas yang sama dari mulai kelas satu sampai kelas sembilan, sehingga hal ini akan membantu wali kelas mengenal siswa dan juga keluarganya sehingga ia dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat kepada siswanya. Di Swedia, mata pelajaran yang diberikan (seperti ilmu pengetahuan sosial) diajarkan oleh guru yang sama selama tiga tahun, dan penerapan sistem yang sama seperti yang telah diterapkan di Denmark sedang diperdebatkan. Di Inggris, penerapan “sistem pastoral” sangat terasa mewarnai tugas seorang guru, yakni menghadapi berbagai dilema kehidupan nyata para siswa yang pada umumnya berhubungan dengan nilai-nilai pribadi.

Berbagai proses dan norma informal, yang terkadang disebut sebagai kurikulum tersembunyi, merupakan sarana lain yang dapat dipergunakan dalam proses pendidikan nilai, terutama nilai-nilai yang berhubungan dengan persamaan gender. Para pihak berwenang di lingkungan sekolah menengah serta para menteri pendidikan biasanya didominasi oleh kaum pria. Observasi mengenai interaksi di ruang kelas menunjukkan bahwa para siswi dibandingkan dengan para siswa

cenderung tidak begitu tegas secara verbal, serta kurang begitu berani mengambil risiko, kecuali para siswi di negara Jerman Barat. Di Inggris sedang dilakukan upaya pengembangan unit kurikulum yang dapat mengatasi permasalahan gender ini. Di Denmark terdapat kesepakatan umum mengenai kesempatan bagi kaum wanita untuk berkarier, meskipun demikian berapa remaja putri menyatakan bahwa ketidakadilan masih tetap ada. Peranan tradisional dari kaum wanita dalam bidang pekerjaan dan politik diperkuat oleh pola pendidikan yang diterapkan di kelima negara. Observasi ini memperkuat data-data yang telah dikumpulkan dalam survei pada tahun 1971. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perbedaan dalam sikap politik kaum pria dan wanita pada dasarnya sama besarnya dengan perbedaan tingkat toleransi umum akan hak-hak kaum wanita serta akan jumlah kaum wanita yang memegang tampuk kepemimpinan politik di negara tersebut (*Tourney-Purta, 1984*). Sebagai contoh, di Swedia, negara yang dikenal akan persamaan gender, hasil penelitian terkini mengenai pengetahuan siswa dan siswi dalam bidang politik dan ekonomi di tingkat sekolah menengah masih tetap menunjukkan keunggulan kaum pria (*Lindquist dkk., 1987*).

Di samping mata pelajaran formal serta berbagai proses informal yang terjadi di ruang kelas dan di lingkungan sekolah, berbagai aktivitas ekstrakurikuler merupakan bagian penting dalam pendidikan kewarganegaraan di kelima negara Eropa Utara yang demokratis ini. Sekolah-sekolah memiliki dewan siswa, namun hampir seluruh siswa dan guru sependapat bahwa kewenangan dewan hanya sebatas merencanakan kegiatan-kegiatan sosial serta kegiatan alam, atau untuk mengurus berbagai persoalan seperti kasus siswa yang mabuk di lingkungan sekolah. Di Jerman Barat, beberapa kelompok siswa baru-baru ini mengadakan sebuah demonstrasi menuntut adanya perubahan dalam kebijakan konservatif yang diterapkan oleh menteri pendidikan, namun aktivitas siswa yang demikian sangatlah jarang ditemukan. Pada umumnya, di sekolah-sekolah menengah terdapat klub-klub siswa yang serupa dengan minat kelompok orang dewasa, namun bedanya klub-klub siswa ini tidak memiliki minat yang jelas dalam bidang politik, serta tidak berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di lingkungan sekolah, kecuali menyangkut persoalan-persoalan tertentu. Dorongan untuk kegiatan sosial, seperti perlindungan hewan dan lingkungan serta

usaha untuk mengurangi jumlah kelaparan di dunia, mengajarkan nilai mengutamakan kepentingan orang lain serta aksi kewarganegaraan. Meskipun siswa yang tergabung dalam kelompok politik remaja, seperti Kaum Konservatif Muda ataupun Kaum Demokrat Sosial, sangat sedikit jumlahnya, namun organisasi-organisasi tersebut mengajarkan berbagai nilai dan keahlian yang berhubungan dengan aktivitas politik kepada para siswa yang tergabung di dalamnya. Semakin banyak jumlah siswa yang belajar mengenai nilai kerja sama, kepemimpinan dan bekerja untuk kepentingan bersama melalui berbagai olah raga tim.

Pada umumnya, kelima negara memiliki kesempatan / momen yang sama untuk mengajarkan nilai. Inti dari nilai yang diajarkan juga relatif sama, yakni mengenai etos kerja, berbagai nilai yang berasal dari agama Kristen Judeo, nilai demokrasi dari partisipasi warga negara, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Penelitian IEA menemukan bahwa kelima negara yang diteliti pada dasarnya memiliki kesamaan dalam struktur perilaku, meskipun para siswa dari berbagai negara menunjukkan perbedaan dalam besarnya dukungan yang diberikan bagi perilaku ini. Di Eropa telah dirintis beberapa usaha untuk menyusun sebuah daftar pendek mengenai inti nilai yang sama yang dapat disetujui oleh para pendidik dan masyarakat, serta di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti kejujuran, taat hukum, serta menghormati orang lain. Dari kelima negara yang diteliti, Swedia menjadi negara terdepan dalam mengeksplorasi dan mengidentifikasi berbagai nilai untuk dicantumkan ke dalam daftar tersebut.

Banyak dari dimensi / berbagai faktor pengaruh yang disebutkan di dalam model, ditemukan di kelima negara. Nampaknya di kelima negara terdapat persamaan dalam usaha meningkatkan pendidikan nilai, hal ini mengindikasikan bahwa kepedulian akan nilai merupakan sebuah kepentingan global yang melampaui kepentingan masing-masing negara. Bagaimana pun juga, terdapat batasan-batasan penting yang berlaku di masing-masing negara, hal ini menyadarkan kita bahwa usaha untuk memahami pendidikan tidak dapat dipisahkan dari politik nasional, serta konteks ekonomi dan budaya. Faktor-faktor ini merupakan faktor pembeda yang paling mendasar dari setiap negara.

Perbedaan dalam Pendekatan Terhadap Pendidikan Nilai

Beberapa perbedaan yang terdapat di kelima negara ini bersifat nyata dan eksplisit, namun ada juga yang bersifat tersembunyi dan implisit. Sebagai contoh, di sekolah-sekolah di Inggris terdapat perbedaan yang nyata di banding dengan ketiga negara lainnya di mana para siswa memakai seragam sekolah. Anak-anak di Inggris tampaknya merupakan kelompok yang paling taat akan peraturan. Di banyak sekolah di Inggris para siswa menyapa gurunya dengan sebutan “Ibu... (*Miss*)” atau “Bapak... (*Sir*)” dan kemudian mereka menunggu untuk melanjutkan pembicaraan hingga mendapatkan izin dari gurunya. Para siswa sekolah menengah lebih banyak menghabiskan waktu mereka di kelas dengan menulis dibanding berbicara, hal ini sangatlah berbeda dengan para siswa di keempat negara lainnya.

Secara tradisional, Inggris menganut sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi, di mana masing-masing wilayah memiliki otonomi pendidikannya sendiri (*LEA / Local Education Authority*), dan terkadang setiap sekolah dapat menentukan kurikulumnya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan mengapa di satu sekolah diajarkan pendidikan sosial dan vokasional sementara sekolah yang lain hanya mengajarkan berbagai ilmu yang bersifat umum saja, dan di sekolah lain tidak terdapat mata kuliah mengenai pendidikan politik dan sosial. Kegiatan keagamaan serta misa harian di lingkungan sekolah merupakan mandat dari Undang-undang Pendidikan (*Education Act 1944*) tahun 1944, namun isi dari kegiatan tersebut diserahkan kepada LEA (masing-masing sekolah). Pada kenyataannya, meskipun setiap sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan kurikulumnya, namun terdapat kesamaan dalam isi kurikulum di seluruh sekolah, hal ini dikarenakan ujian nasional yang pada umumnya harus diikuti oleh siswa pada saat berusia enam belas tahun, dan 30 persen dari siswa tersebut mendapatkan nilai A. Sistem Ujian Pendidikan Umum Tingkat Menengah yang baru memungkinkan untuk terjadinya berbagai kesamaan dalam berbagai bidang di seluruh sekolah di Inggris. Sistem tersebut menggagas kurikulum inti nasional yang jika diimplementasikan dapat mengurangi berbagai perbedaan yang terdapat

di setiap wilayah (*LEA*). Diperkirakan sekitar 90 persen dari keseluruhan jadwal sekolah akan ditentukan oleh kurikulum inti nasional.

Tujuh persen dari siswa di Inggris menimba ilmu di sekolah-sekolah swasta yang disebut dengan “sekolah umum (*public schools*)”. Sekolah jenis ini dijalankan dan dibiayai oleh pihak swasta, sekolah ini juga memberikan prioritas yang sangat tinggi akan pendidikan nilai. Banyak dari sekolah ini yang memiliki kapel (gereja kecil) dan juga memasukan agama sebagai salah satu mata pelajarannya. Berbagai cabang olah raga dianggap sebagai sesuatu yang penting oleh sekolah ini. Pada umumnya, kebanyakan dari para pemimpin politik dan para pemimpin bisnis merupakan alumni dari sekolah umum, hal ini diduga karena di sekolah umum mereka mempelajari berbagai nilai yang berhubungan dengan pelayanan umum serta wirausaha di samping mempelajari ilmu kepemimpinan. Sekolah umum di Inggris menerapkan sebuah model yang menurut pendapat beberapa pihak harus ditiru oleh sekolah-sekolah negeri, yakni dengan memasukan pengajaran tata karma dan pengajaran nilai ke dalam kurikulum mereka.

Negara Jerman Barat merupakan negara yang menganut sistem federal, di mana tanggung jawab akan pendidikan berada di tangan departemen pendidikan di masing-masing 11 negara bagian. Sebagai contoh, mata pelajaran sejarah atau agama di seluruh sekolah di negara bagian *Nordrhein-Westfallen* mengacu kepada panduan kurikulum yang berlaku untuk negara bagian tersebut, namun mata pelajaran ini akan berbeda dengan mata pelajaran pada sekolah-sekolah di negara bagian Bayern atau pun Hessen, karena setiap negara bagian memiliki panduan kurikulumnya sendiri. Konteks maupun iklim politik di setiap negara bagian tampaknya mempengaruhi cara penanganan berbagai permasalahan nilai. Sebagai contoh, pada era 70 dan 80an di sekolah-sekolah yang berada di negara bagian Hessen banyak diselenggarakan berbagai diskusi mengenai berbagai persoalan kontroversial, dibanding di negara-negara bagian lainnya yang masih konservatif. Namun pada tahun 1987, ketika koalisi kanan berkuasa di Hessen, maka filosofi serta pola organisasi dari sekolah-sekolah komprehensif yang dulu populer pada saat partai Sosial Demokrat berkuasa mulai mengalami pergeseran. Hal ini akan

menimbulkan perubahan sikap terhadap berbagai diskusi kelas mengenai persoalan yang bersifat kontroversial.

Di Belanda, pemerintahan di berbagai tingkat – negara, provinsi dan kota madya – memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan, sehingga negara ini memiliki banyak sekali aturan-aturan nasional yang mengatur bidang pendidikan, salah satunya adalah undang –undang parlemen, serta berbagai ketetapan yang mengatur pengimplementasiannya. Undang-undang pendidikan ini – undang-undang pendidikan dasar dan undang-undang pendidikan menengah-memuat aturan mengenai standar kurikulum dan standar ujian. Menteri pendidikan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan menengah di sekolah-sekolah negeri, walikota bertanggung jawab terhadap sekolah-sekolah yang memiliki otonomi lokal, sedangkan dewan sekolah bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pendidikan menengah di sekolah-sekolah Katolik, Protestan ataupun sekolah-sekolah swasta yang tidak ada hubungannya dengan agama tertentu. Perbedaan dalam kewenangan tersebut dapat mengakibatkan adanya perbedaan dalam pendekatan terhadap pendidikan nilai, namun perbedaan tersebut tidaklah sebesar yang dibayangkan. Sebagai contoh, dari hasil pengamatan dalam penelitian ini para guru di ketiga jenis sekolah terbukti sama-sama mengadakan berbagai diskusi kelas mengenai berbagai persoalan nilai yang bersifat kontroversial. Proses wawancara terlebih dahulu dilakukan sebelum para guru ditempatkan di setiap sekolah, sehingga guru-guru yang tidak merasa nyaman dengan aturan-aturan yang berlaku di sekolah-sekolah Protestan dan Katolik tidak akan ditugaskan untuk mengajar di sekolah tersebut.

Pengajaran etos kerja merupakan salah satu bagian penting dari pendidikan nilai pada mayoritas sekolah-sekolah di Belanda. Sekolah-sekolah yang tidak bertujuan mempersiapkan para siswanya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (seperti di *a gymnasia athenea* atau *lycea*) akan membekali siswanya dengan berbagai mata pelajaran yang bersifat vokasional. Para siswa sekolah menengah umum (*havos, mavos* atau *lavos*) pada umumnya mempelajari mata pelajaran yang bersifat vokasional seperti juga mata pelajaran umum lainnya. Siswa sekolah menengah lainnya terdaftar di sekolah-sekolah vokasional atau kursus-kursus keahlian. Bagian yang paling signifikan dalam keseharian dari

mayoritas siswa tingkat menengah, serta bagian terbesar dari anggaran pendidikan nasional dialokasikan untuk kegiatan pelatihan / persiapan kerja.

Sejak 1968, seluruh sekolah di Belanda mengajarkan *maatschaapijleer* (mata pelajaran sosial) yang merupakan mata pelajaran yang tidak diujikan, di samping mengajarkan sejarah dan geografi yang termasuk ke dalam kelompok mata pelajaran yang diujikan. *Maatschaapijleer* terdiri dari enam bidang kajian – pendidikan, rumah dan lingkungan, kerja dan waktu luang, negara dan masyarakat, teknologi dan masyarakat serta hubungan internasional. Pada tahun 1987 para anggota parlemen yang sangat konservatif mengajukan proposal untuk menentukan alokasi waktu minimal bagi mata pelajaran dasar pada tiga tahun pertama jenjang sekolah menengah, namun dalam proposal itu tidak mengikutsertakan *maatschaapijleer* sebagai mata pelajaran yang perlu dikurangi alokasi waktunya.

Denmark merupakan negara dengan sistem pendidikan yang tersentralisasi. Menteri pendidikan bertugas untuk menerbitkan panduan kurikulum yang bersifat tidak mengikat sekolah dasar, namun wajib untuk ditaati oleh sekolah menengah. Di antara kelima negara yang diteliti di dalam penelitian ini, Denmark merupakan negara yang paling menekankan nilai individualisme, namun tetap memiliki rasa keterikatan yang kuat sebagai sebuah kelompok. Salah satu keunikan dari negara ini adalah fakta bahwa para siswa memiliki teman sekelas dan wali kelas yang sama selama sembilan tahun pertama mereka sekolah. Sejarah bangsa Denmark, geografi, pendidikan agama Kristen (berdasarkan prinsip Gereja Luther Denmark) serta bahasa Denmark, diajarkan selama sembilan tahun. Pada kelas tujuh, para siswa mulai diberikan mata pelajaran kontemporer. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang membahas permasalahan tertentu, di mana siswa dapat menentukan sendiri topik-topik yang akan dikaji. Salah satu contoh permasalahan yang dibahas oleh para siswa di tingkat sembilan pada tahun 1987 adalah kekerasan video dan kultur remaja. Pada tingkat akhir pendidikan menengah, hubungan antara blok Barat dan Timur, serta perkembangan ekonomi di negara-negara ketiga sering menjadi topik bahasan mata pelajaran kontemporer.

Pada umumnya diskusi-diskusi kelas mengenai berbagai persoalan nilai yang bersifat kontroversial di sekolah-sekolah di Denmark merupakan sesuatu yang dapat diterima dan biasanya ditemukan hampir di seluruh mata pelajaran. Tujuan utama dari *Folkeskole* (sekolah kelas 1-9 atau 10) seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1975 adalah “memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk memperoleh pengetahuan, keahlian dan metode kerja, serta berbagai cara untuk mengekspresikan diri mereka sendiri... untuk menciptakan kesempatan bagi pengalaman dan eksplorasi diri yang memungkinkan siswa untuk... mengembangkan kemampuannya dalam membuat penilaian dan evaluasi yang independen serta untuk membentuk opini” (Departemen Pendidikan Denmark, 1983). *Klassens-times* atau pertemuan kelas yang merupakan tempat bagi para siswa untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang terdapat di kelas, berbagai permasalahan yang berhubungan dengan dewan siswa (Osis) maupun membicarakan rencana pesta kelas ataupun perjalanan / karya wisata tahunan, dilaksanakan satu minggu sekali. Memberanikan siswa untuk mengemukakan pendapatnya dalam diskusi kelas yang terbuka, merupakan salah satu tujuan dari mata pelajaran seperti mata pelajaran / studi kontemporer.

Di Denmark, dewan siswa (Osis) serta pengurus kelas nampaknya memiliki kekuasaan yang besar. Hukum Sekolah di Denmark menyatakan bahwa tujuan dari sekolah adalah untuk mengajarkan demokrasi melalui berbagai praktek dalam pembuatan keputusan dan tanggung jawab. Selain dewan siswa yang aktif dan para guru yang terlibat dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah, para siswa dan guru di Denmark juga dapat memilih anggota dari dewan sekolah, di mana kepala sekolah dan perwakilan orang tua berkedudukan sebagai anggota. Hal ini sangatlah berbeda dengan keadaan di negara-negara lainnya, di mana kepala sekolah (ataupun kepala sekolah wanita) di Inggris, atau direktur sekolah di Jerman Barat memiliki kekuasaan penuh dalam pengambilan keputusan. Struktur kekuasaan diterapkan dengan cara lain. Para siswa di Denmark memanggil guru mereka dengan nama depannya, sementara di negara lain para guru dan tenaga administrasi disapa secara formal.

Swedia memiliki sistem pendidikan yang tersentralisasi, di mana Badan Pendidikan Nasional, setelah berkonsultasi dengan para pendidik, politikus dan

kelompok masyarakat, merumuskan tujuan dan panduan kurikulum serta silabus untuk masing-masing mata pelajaran yang disesuaikan dengan tujuan dari kurikulum umum yang telah disetujui oleh parlemen. Dokumen-dokumen ini kemudian dikirimkan ke sekolah-sekolah bersama dengan bahan-bahan yang berisi saran / panduan pengimplementasian. Kurikulum baru yang berlaku bagi sekolah komprehensif dirumuskan pada tahun 1980.

Kurikulum di Swedia mengharuskan diadakannya sebuah pertemuan formal mingguan bagi pengurus kelas (termasuk seluruh anggota pengurus kelas, dengan kursi yang dirancang sedemikian rupa, dilengkapi dengan sekretaris, anggota parlemen dan notulen), yang diadakan di setiap tingkat. Kegiatan ini merupakan sebuah latihan praktek proses demokrasi kelompok, dan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan di Swedia, karena kecenderungan masyarakatnya sangat menghargai konsultasi kelompok dalam pemecahan berbagai permasalahan. Diskusi yang melibatkan pengurus / dewan kelas pada kelas tingkat awal, yakni kelas dengan siswa yang baru berusia tujuh sampai dengan sepuluh tahun, dapat digunakan sebagai salah satu cara bagi guru untuk membangun semangat kelompok dalam diri siswa. Pengurus / Dewan ini membahas berbagai persoalan seperti penggalangan dana untuk penanaman pohon di Etopia, hingga ketidaksepakatan dengan peraturan sekolah. Pada diskusi di tingkat pertama kelas akan dibagi ke dalam dua kelompok yang terdiri dari dua belas hingga lima belas orang, persoalan moral yang akan dibahas dipilih dari sumber bacaan yang dibacakan di depan kelas.

Perhatian utama akan nilai secara jelas tercantum dalam silabus ilmu sosial, dan khususnya dalam mata pelajaran yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan, yang merupakan salah satu mata pelajaran orientasi yang diajarkan selama satu hingga tiga jam per minggu pada kelas tujuh hingga kelas sembilan. Pada tingkat sekolah terdapat fleksibilitas dalam penerapan kurikulum, semenjak setiap sekolah dapat menentukan jadwalnya sendiri yang disesuaikan dengan silabus serta dapat menentukan topik –topik tertentu. Meskipun tidak terdapat ujian nasional dan sedikitnya jumlah pengawas sekolah, namun sekolah-sekolah di Swedia tetap taat terhadap kurikulum pusat.

Kurikulum 1980 secara jelas mencantumkan jumlah nilai yang wajib diajarkan oleh sekolah. Sebagai contoh, “Perintah harus dapat membantu menanamkan pemahaman terhadap orang lain dan kondisi dirinya sendiri pada diri setiap siswa, sebagai dasar tumbuhnya rasa keadilan dan solidaritas”. Keadilan dan solidaritas merupakan aspek penting dari organisasi sekolah dan dari pengajaran nilai di kelas. Beberapa bagian kurikulum membahas berbagai mata pelajaran yang berhubungan dengan keagamaan, yang wajib diberikan di setiap tingkat / jenjang pendidikan. Secara umum, keyakinan penganut ajaran *Luther* mengenai sifat dasar umat manusia dan masyarakat merupakan sumber sejarah / dasar dari ilmu-ilmu yang kini diajarkan dalam ilmu pengetahuan sosial. Sejak tahun 1919 kurikulum tidak lagi memuat ajaran *Luther* maupun katekismus dalam bidang keagamaan (mata pelajaran agama). Dalam pendidikan agama, kurikulum 1980 menyebutkan; “sekolah bertujuan membantu siswa dalam merenungkan berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan dan makna yang terkandung dibalikny... dan (memberikan) pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai agama Kristen” (Dewan Pendidikan Nasional Swedia, 1980a, pp. 7 dan 9).

Perdebatan sengit mewarnai perumusan kurikulum 1980, khususnya perubahan dalam pendidikan agama (mata pelajaran dengan penekanan akan perbandingan agama dan berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan eksistensi). Perubahan mendasar lainnya yang terdapat dalam kurikulum 1980 adalah anjuran mengenai pengajaran konflik dan permasalahan kontroversial sebagai persiapan bagi kewarganegaraan dalam demokrasi. Kurikulum 1969 menyatakan secara tegas mengenai keobjektifan dan kenetralan dari pengajaran ilmu pengetahuan sosial yang berbasis ilmu, sehingga para guru menghindari penyelenggaraan diskusi kelas mengenai persoalan yang bersifat kontroversial. Sebaliknya, dalam kurikulum 1980 tercantum:

Secara netral dan empiris menuntut agar masyarakat tidak digambarkan sebagai sesuatu yang harmonis dan terbebas dari konflik. Sebaliknya, sangatlah penting bagi anak-anak untuk menyadari hubungan antara konflik individu, sosial dan nasional, dan pada sisi lain, juga menyadari adanya agresi, kekerasan dan peperangan. Sekolah harus membuat

siswanya menyadari adanya manusia yang hidup dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda dengan dirinya, karena hal ini dapat mengurangi sikap antipati terhadap kelompok yang berbeda. Berbagai diskusi mengenai konflik dan pemecahannya Diterapkan dalam pengajaran seluruh mata pelajaran, pada pertemuan komite kelas, serta konteks lainnya yang melibatkan diskusi mengenai hubungan antar umat manusia (Dewan Pendidikan Nasional Swedia, 1980b, pp. 25).

Sebagai akibat dari pernyataan seperti di atas yang tercantum di dalam kurikulum, maka para guru merasa memiliki izin untuk mengadakan diskusi kelas mengenai persoalan yang bersifat kontroversial, meskipun mereka dituntut mampu memberikan pembahasan yang berimbang (adil). Namun bagaimanapun juga, banyak guru, terutama mereka yang dilatih untuk mengajarkan mata pelajaran yang bersifat teoritis bagi siswa di tingkat 7-9, tidak begitu memperhatikan berbagai persoalan kontroversial serta sedikit sekali mendiskusikan berbagai konflik yang terjadi, dibanding yang mereka lakukan sebelum tahun 1980. Penanaman rasa kebersamaan sebagai salah satu cara dalam menengahi dan meleraikan konflik masih perlu ditingkatkan.

Meskipun kurikulum mencantumkan: “bahan ajaran yang dicetak haruslah mendorong lahirnya kaya tulis dan dapat mengundang perdebatan yang kritis.”, namun seri buku paket yang digunakan di sekolah-sekolah di Swedia tidak dapat secara efektif merealisasikan aturan kurikulum tersebut. Buku-buku tersebut menitikberatkan pendeskripsian materi dalam teks bacaannya, sementara pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di akhir bab berfungsi untuk mengumpulkan kembali informasi yang terdapat di dalam teks, bukan berfungsi untuk mendorong diadakannya diskusi mengenai persoalan-persoalan yang aktual.

Sebuah kurikulum baru bagi sekolah menengah tingkat akhir sedang dikembangkan dan sedang diperdebatkan sejak tahun 1981. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan dan minat awal mereka melalui berbagai diskusi mengenai persoalan kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai stimulus bagi proses pencarian dan analisis berbagai

informasi faktual dari berbagai sumber serta pemahaman akan nilai yang dianut oleh berbagai kelompok, dan aksi.

Program-program tertentu dari kelima negara ini membantu menjelaskan mengenai pengaruh sekolah terhadap nilai yang dianut oleh para siswa, cara sekolah membuat keputusan secara umum, serta dampak yang ditimbulkan dalam konteks politik, sosial dan keagamaan, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Pada kenyataannya, selain terdapat kesamaan dalam pendidikan nilai, kelima negara ini juga memiliki keunikan tersendiri yang dapat membantu menjelaskan alasan dari perbedaan tingkat perubahan minat dalam pendidikan nilai pada masing-masing negara.

Pembaharuan Minat Terhadap Pendidikan Nilai

Pada tahun 1980an terdapat pembaharuan minat dalam bidang pendidikan nilai yang terjadi di Inggris, Jerman Barat, Belanda dan Denmark, serta dalam hal tertentu terjadi juga di Swedia. Beberapa kelompok menyatakan pembaharuan minat ini dikarenakan banyaknya kekurangan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga pada akhirnya menimbulkan demonstrasi siswa di tahun 1960an. Kelompok ini menyatakan keinginannya untuk kembali memperhatikan mata pelajaran seperti bahasa nasional, sejarah dan matematika. Kondisi di kelima negara yang terus-menerus menjadi tempat tujuan para imigran yang berasal dari bangsa-bangsa di luar kawasan Eropa Utara, menyebabkan perlunya perhatian yang lebih terhadap perbedaan dalam nilai keagamaan, politik dan ekonomi. Berkuasanya para politikus konservatif telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat untuk kembali kepada nilai-nilai tradisional yang berhubungan dengan kebudayaan yang lebih homogen yang pernah berlaku di masa lalu. Para politikus yang lebih konservatif ini mendapatkan kedudukan sebagai pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan, sehingga pada akhirnya nilai-nilai tradisional pun kembali diberlakukan.

Di Inggris, dorongan akan adanya pembaharuan minat dalam bidang pendidikan nilai muncul pada pertengahan tahun 70an melalui sejumlah publikasi dari Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (DES / *Departement of Education and Science*) yang mengulas dan mengkaji ulang kurikulum sekolah.

Pendidikan nilai menjadi salah satu topik yang di bahas pada acara debat mengenai persoalan pendidikan yang diadakan oleh Perdana Menteri *Callaghan* pada tahun 1976, dan kemudian diteruskan oleh Perdana Menteri *Thatcher*. Pada acara ini banyak pihak menyampaikan kepeduliannya akan peran Inggris dalam bidang pendidikan di Eropa dan di dunia, dan juga akan pengaruh dari media masa terhadap identitas dan warisan budaya (Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, 1977, 1979, 1980a, 1980b, 1981; Inspektorat Kerajaan, 1977).

Pada tahun-tahun pertama perdebatan, para politikus dipanggil untuk memberikan pendidikan politik, namun akhir-akhir ini pelaksanaannya semakin berkurang. Pergerakan pendidikan politik di tahun 1970an muncul sebagai akibat dari kepedulian akan kurangnya kesadaran politik dari para lulusan. Hal tersebut menekankan perlu dikembangkannya “kesadaran politik”, yang didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai politik di dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep-konsep politik, seperti kekuasaan, kemerdekaan dan otoritas, serta mendukung nilai-nilai demokratis yang bersifat prosedural, seperti kebebasan, toleransi, keadilan serta rasa hormat akan kebenaran dan kelayakan fakta. Pendukung dari gerakan pendidikan politik di tahun 1970an berpendapat bahwa mata pelajaran yang bersifat tradisional, seperti sejarah, tidak efektif dalam meningkatkan pengetahuan sosial para remaja, karena mata pelajaran yang membahas mengenai konstitusi Inggris hanya diminati oleh sedikit siswa (*Heater*, 1969; *Stradling* 1975; *Crick* dan *Lister*, 1978; *Crick* dan *Porter*, 1978). Pada tahun 1970an para politikus dari kedua partai politik mayoritas bergabung dalam penetapan kebijakan pendidikan untuk membantu tugas Asosiasi Politik dalam mempromosikan kesadaran politik. Inspektorat Kerajaan secara resmi memberikan dukungan terhadap pergerakan yang terjadi di tahun 1977 ini, yakni dengan merekomendasikan “kompetensi politik” sebagai salah satu tujuan kurikulum yang termuat dalam Kurikulum 11-16. Minat terhadap pendidikan politik mencapai puncaknya pada tahun 1980. Melalui sebuah survei nasional, terungkap bahwa mayoritas sekolah di Inggris mengajarkan mata pelajaran yang memuat isu-isu politik dan sosial yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran umum yang tidak diujikan, mata pelajaran ini berjudul, studi umum, studi sosial,

pendidikan sosial atau pendidikan sosial dan vokasional (*Stradling* dan Noctor, 1986).

Pada tahun 1980 minat terhadap pendidikan sosial di Inggris berubah menjadi usaha-usaha untuk mempromosikan studi mengenai persoalan global (dunia), pendidikan di negara-negara berkembang, pendidikan multikultural dan anti rasisme, pendidikan perdamaian, pendidikan lingkungan serta pendidikan hak-hak manusia. Semua studi di atas mengajarkan nilai secara eksplisit (*Lister*, 1986). Perundang-undangan baru (*New Right*) di Inggris menuntut agar pendidikan perdamaian berubah kembali menjadi “pendidikan ketenteraman (*appeasement education*)” (*Heater*, 1986).

Golongan konservatif di Inggris menuntut diberlakukannya kembali “nilai-nilai Victorian”, seperti berfungsinya kembali keluarga sebagai tempat diberlakukannya pendisiplinan berbagai kode moral seperti perilaku, patriotisme, rendah hati, tradisi, etos kerja kaum Protestan, bekerja keras, sifat berhemat dan sifat-sifat umat kristiani. Di samping itu terdapat juga kepedulian untuk meningkatkan perekonomian melalui kerja keras dan semangat kewirausahaan. Pada masa terjadinya pemotongan anggaran besar-besaran dari Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, subsidi pemerintah untuk sekolah-sekolah tetap mengalir melalui Departemen Ketenagakerjaan yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan tenaga kerja, serta pendidikan teknik dan vokasional. Tujuan utama dari program pendidikan vokasional adalah untuk menanamkan berbagai nilai dalam diri anak muda, seperti tepat waktu, kedisiplinan, rasa bangga karena melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan bekerja keras.

Pendidikan nilai juga menjadi sebuah tema yang diperdebatkan di Inggris, dengan penekanannya terhadap penerapan pendidikan agama (*RE/religious education*) pada masyarakat yang multikultural. Mayoritas materi pendidikan agama di sekolah dasar masih diisi oleh berbagai kisah yang terdapat di dalam alkitab, dan forum diskusi yang membahas kandungan dari alkitab. Di tingkat pendidikan menengah, pendidikan agama membahas mengenai posisi umat Kristiani dalam berbagai persoalan sosial. Namun, beberapa guru bidang studi (yang mengajarkan agama), khususnya di sekolah-sekolah dengan banyak siswa yang berasal dari kaum imigran, mengadakan perubahan dalam arah pengajaran

agama dari ajaran kaum gereja Anglikan menjadi pendekatan perbandingan agama. Namun banyak pihak yang tidak setuju dengan usaha ini. Beberapa orang tua muslim dan yahudi merasa bahwa pelajaran agama yang bersifat multi keyakinan tidak sesuai bagi anak-anak mereka, karenanya mereka menuntut diadakannya sekolah khusus bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, beberapa pihak menuntut agar sekolah mempertegas kembali pengajaran paham kaum Kristen Anglikan pada masyarakat Inggris. Hingga kini, baik berbagai konflik mengenai nilai-nilai keagamaan maupun mengenai nilai-nilai ekonomi dan politik menjadi bahan perdebatan dalam penetapan kurikulum sekolah. Perbedaan pandangan tampak semakin jelas dalam kurikulum nasional yang dirumuskan pada tahun 1987, yang dapat diterapkan di sekolah dengan komunitas yang beragam.

Pendapat yang sama mengenai pendidikan nilai ditemukan pula di Belanda dalam konteks “polarisasi” yang hanya terapat di Belanda. Polarisasi merupakan sebuah tradisi yang menjadikan keragaman keagamaan masyarakat Belanda sebagai landasan dalam pengorganisasian pendidikan. Di Belanda terdapat berbagai jenis sekolah negeri yang berupa sekolah Protestan, Katolik maupun sekolah yang tidak ada hubungannya dengan agama tertentu, di mana setiap sekolah memiliki dewan sekolah, perhimpunan guru-guru, institut pelatihan guru, serta pusat pengembangan kurikulum, sehingga nilai-nilai ajaran agama katolik dapat diajarkan melalui kurikulum formal dan informal di sekolah-sekolah Katolik, dan berbagai nilai ajaran agama Protestan dapat tetap diajarkan pada sekolah-sekolah Protestan. Dalam prakteknya, para pendidik melaporkan bahwa terdapat sedikit perbedaan dalam pendekatan pengajaran nilai dikarenakan masyarakat pada masa kini yang bersifat sekuler (Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, 1986; *Hooghof*, 1987). Polarisasi dalam bidang pendidikan ini dapat mengurangi berbagai tekanan mengenai pendidikan nilai di Belanda, namun pada dasarnya hal ini tidak dapat mengurangi kekhawatiran yang ada. Belanda sedang mempertimbangkan persoalan polarisasi baru bagi agama yahudi, yakni untuk mendirikan sekolah negeri yang berupa sekolah yahudi.

Selain itu, di Belanda beberapa politikus yang beragama katolik dan Protestan dimintai bantuan untuk mempertegas kembali nilai-nilai denominasional (yang berhubungan dengan agama tertentu) sebagai salah satu cara untuk

mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan seperti kriminalitas, penyalahgunaan obat-obatan, bunuh diri dan kekerasan. Para orang tua mengungkapkan kekhawatirannya akan menurunnya rasa hormat dan sopan santun pada diri anak-anak mereka. Di samping itu, terdapat pula pembaharuan minat para ahli dalam pendidikan nilai. Pusat Inovasi Katolik (FPC / *The Catholic Innovations Centre*) telah mengembangkan sebuah kurikulum pendidikan nilai yang baru yang membahas tema-tema masa depan seperti buruh / tenaga kerja dan gender. Program ini mengadaptasi program-program yang dicetuskan oleh *Van der Ven* dari universitas Nimegen (Katolik) mengenai “Pengomunikasian nilai-nilai”, yang direalisasikan dalam bentuk dialog mengenai berbagai nilai. Pendekatan teoritis dalam pendidikan nilai ini bersifat tidak terlalu individualistis dibandingkan dengan pendekatan yang dicetuskan oleh *Raths* dan kawan-kawan dalam sebuah tulisan yang berjudul “Klarifikasi Nilai-Nilai”.

Di Belanda, seperti juga di negara-negara lain tempat diselenggarakannya penelitian ini, terapat kepedulian di kalangan publik mengenai pendidikan nilai dalam hubungannya dengan para imigran dan pengungsi, yakni kepedulian untuk memberikan pengajaran mengenai “dasar-dasar” bahasa, sejarah serta ideologi nasional. Di beberapa wilayah di Amsterdam dan Rotterdam, 70 persen dari penduduknya adalah pendatang (imigran dan pengungsi). Partai-partai politik konservatif baru bereaksi terhadap meningkatnya jumlah imigran, yakni dengan memberikan perhatian yang lebih kepada identitas nasional dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Para politikus dan orang tua bereaksi menentang proses pendidikan yang populer pada tahun 1960 dan 1970an. Mereka ingin kembali kepada penekanan pengajaran berbasis fakta pada mata pelajaran sejarah dan geografi, serta menjadikan bahasa dan matematika sebagai mata pelajaran dasar (wajib). Terdapat persoalan lain, sama dengan persoalan yang terjadi di Inggris, yakni pergerakan anti rasisme serta berbagai usaha yang berhubungan dengan hal tersebut dianggap oleh beberapa warga negara Belanda yang konservatif sebagai sesuatu yang beraliran kiri. Bagaimanapun juga, para pendidik melaporkan bahwa pada masa kini para siswa tidak begitu tertarik untuk bergabung dengan pergerakan sosial, namun lebih mementingkan cara untuk mendapatkan pekerjaan.

Debat publik dan debat politik tidak mengungkap persoalan-persoalan yang terjadi secara keseluruhan. Berbagai pandangan konservatif muncul di luar lingkaran pendidikan, sementara pernyataan yang bersifat lebih liberal muncul di forum diskusi para ahli, hal ini mengakibatkan terjadinya perkembangan kurikulum serta perkembangan dalam implementasi pendidikan lingkungan, pendidikan interkultural serta dimensi pendidikan di kawasan Eropa.

Di Jerman Barat, kesuksesan dalam bidang politik yang dicapai oleh partai politik konservatif terjadi seiring dengan meningkatnya minat dalam pengajaran berbagai nilai tradisional. Di Jerman Barat, seperti juga di negara-negara lainnya, beberapa kelompok merasa terganggu oleh kelonggaran dan pergeseran dalam proses pendidikan yang terjadi pada tahun 1960 dan 1970an. Pada masa itu muncul tuntutan diberlakukannya kembali pengajaran matematika serta sejarah dan geografi yang berbasis kejermanan. Beberapa kelompok menginginkan agar bahasa Latin mendapatkan tempat yang penting di dalam kurikulum. Beberapa pakar pendidikan Jerman pada tahun 1980an memasukan studi global (dunia), serta pendidikan perdamaian dan lingkungan ke dalam proses pengajaran, namun hal ini menuai kritik dari berbagai pihak. Di negara bagian Hessen, mata pelajaran yang membahas mengenai persoalan-persoalan kontemporer bagi siswa usia 16-19 tahun digantikan oleh mata pelajaran mengenai kronologis sejarah. Pengaruh yang dimiliki oleh teoretikus kritikal aliran kiri terhadap beberapa bagian dari kurikulum studi sosial yang berlaku di Jerman pada tahun 1970an, berakhir pada tahun 1987.

Di Jerman Barat, seperti juga di negara-negara lainnya, terdapat kekhawatiran mengenai masalah pengangguran dan imigran. Program-program baru telah dikembangkan bagi persiapan pendidikan vokasional. Para pekerja asing yang berasal dari Turki yang didatangkan ke Jerman guna mengatasi persoalan kekurangan tenaga kerja yang terjadi pada tahun 1950an, tidak meninggalkan Jerman meskipun angka pengangguran di Jerman mengalami peningkatan pada tahun 1980an. Di beberapa daerah, anak-anak dari para pekerja ini berhasil berintegrasi ke dalam masyarakat Jerman di banding di daerah lainnya. Kekhawatiran semakin bertambah ketika terjadi peningkatan dalam

jumlah pengungsi yang berasal dari Jerman Timur, yang masuk ke Jerman Barat melalui Berlin.

Pengaruh yang dimiliki oleh Partai Hijau terhadap remaja, serta berbagai aksi menentang peluru kendali nuklir, di sisi lain menimbulkan kekhawatiran baru akan nilai-nilai yang dianut oleh generasi muda Jerman, karena pada dasarnya nilai-nilai diperoleh lebih banyak dari lingkungan / pergaulan remaja ataupun media masa dibandingkan dari lingkungan sekolah dan keluarga. Pada waktu yang bersamaan, jumlah siswa sekolah menengah tingkat akhir yang memilih mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran pilihan, mengalami peningkatan.

Di Denmark juga terjadi kebangkitan minat dalam bidang pendidikan nilai yang terjadi pada tahun 1980an, bersamaan waktunya dengan berkuasanya partai koalisi konservatif di pemerintahan. Departemen Pendidikan diperintahkan untuk kembali mengajarkan nilai-nilai tradisional yang berhubungan dengan “harga diri bangsa Denmark”. Sedangkan undang-undang sekolah yang berlaku telah terlebih dahulu menyerukan kembalinya pengajaran yang “mendasar” (sesuai dengan kebudayaan bangsa Denmark). Hal ini mengakibatkan para guru di sekolah-sekolah melakukan perubahan dalam pengajaran bahasa dan sejarah Denmark. Para guru dan orang tua mempertanyakan perubahan yang tidak terstruktur yang terjadi di tahun 1960an. Baru-baru ini, undang-undang pedagogis yang berlaku di Denmark menegaskan bahwa anak-anak memerlukan lebih banyak lagi strukturisasi. Namun, hal itu akan menyebabkan terjadinya penyusutan / pengurangan partisipasi siswa dalam kegiatan pengambilan keputusan di sekolah maupun dalam diskusi terbuka mengenai persoalan-persoalan kontroversial yang merupakan karakteristik dari sekolah-sekolah di Denmark (Departemen Pendidikan Denmark, 1983).

Di Swedia, setelah berkuasanya partai Sosial Demokrat selama tiga puluh tahun berturut-turut, maka tahun 1976-1982 merupakan era berkuasanya koalisi partai konservatif. Namun, dengan berubahnya partai yang berkuasa tidak terdapat perubahan yang berhubungan dengan persoalan nilai, terutama dikarenakan tradisi konsultasi di Swedia yang melibatkan seluruh partai yang berkepentingan, dan merupakan sebuah kegiatan yang menghabiskan waktu. Pada akhir tahun 1970, muncul kekhawatiran mengenai siswa yang putus sekolah dan apatis terhadap

pendidikan, perkelahian pelajar, vandalisme dan berkurangnya prestasi siswa dalam belajar. Beberapa pihak berpendapat bahwa reformasi sekolah yang terjadi pada tahun 1960 sudah di luar jalur. Pada tahun 1978 dibentuk sebuah kelompok studi untuk meneliti persoalan Formasi dan Penyebaran Standar Moral di lingkungan Sekolah yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai cara yang digunakan oleh sekolah dalam “menyebarkan standar fundamental dari hubungan antar manusia yang dapat digambarkan sebagai sebuah ... persamaan yang hampir mirip dengan pendidikan“ (Kelompok Studi Formasi dan Penyebaran Standar Moral di lingkungan Sekolah, 1979, p. 5). Kelompok studi ini beranggotakan perwakilan dari kelompok orang tua, murid, guru, pengurus administrasi sekolah serta Badan Pendidikan Nasional. Tujuan dari kelompok ini adalah mendorong terselenggaranya berbagai perdebatan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan generasi muda, dan secara eksplisit menolak anggapan bahwa mereka menyerahkan pembentukan moral anak-anaknya kepada negara.

Media cetak menjadi sarana yang dipilih oleh para pakar pendidikan, dan sebuah buklet setebal lima puluh tiga halaman diterbitkan pada tahun 1979 dengan judul *Skolan Skall Fostra: En Debattskrift* (Sekolah Dapat Menjadi Media Pendidikan: Sebuah Buku Panduan Debat. Buku terjemahan berbahasa Inggris berjudul Sekolah dan Pendidikan). Buklet ini dikemas secara menarik dan disertai dengan kartun sebagai ilustrasinya. Buklet ini didistribusikan ke seluruh pelosok Swedia dan menjadi bahan perbincangan, bukan saja di kalangan orang tua dan guru, melainkan juga dikalangan personil sekolah, seperti penjaga sekolah dan petugas kantin.

Buku ini memuat sederet nilai yang dianggap penting dalam demokrasi: toleransi, persamaan hak, rasa hormat akan kebenaran, keadilan serta martabat manusia. Sekolah haruslah berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai ini guna mempertahankan eksistensi nilai-nilai tersebut, serta demi kelangsungan hidup manusia / masyarakat:

Banyak sekali terdapat poin-poin penting yang berhubungan dengan nilai-nilai yang telah kita sepakati di negara ini. Terdapat beberapa hal yang

bisa kita anggap benar dan pantas tanpa harus mengorbankan kemerdekaan orang lain... sama dengan aturan main dari seluruh partai politik dan juga dengan keyakinan dari berbagai agama serta filosofi. Merupakan tugas bagi seluruh orang dewasa baik di rumah maupun di sekolah untuk menjelaskan dan mendemonstrasikan nilai-nilai ini kepada para remaja... Sekolah haruslah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam memberikan kapasitas moral bagi siswa untuk memperhatikan dan memahami kepentingan orang lain dan selalu mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam melakukan sesuatu... Sekolah haruslah memberikan pendidikan kepada siswanya (Kelompok Studi Formasi dan Penyebaran Standar Moral di Lingkungan Sekolah, 1979, p. 10).

Laporan di atas menjelaskan bahwa meskipun setiap siswa memiliki kebebasan dalam mengeksplorasi berbagai nilai, namun relativisme (sebuah paham yang beranggapan bahwa semua nilai itu sama) tidak dapat diterima.

Beberapa contoh yang dikutip di dalam laporan hasil penelitian kelompok tersebut mengkaji persoalan para imigran, baik mengenai permasalahan mereka dalam proses penyesuaian diri, maupun persoalan munculnya tradisi dan kebudayaan yang berbeda dalam masyarakat Swedia.

Beberapa imigran mungkin menganut nilai-nilai... yang mungkin sangat tidak sesuai dengan salah satu nilai yang paling fundamental yang berlaku di dalam masyarakat kita, contohnya persamaan hak antara pria dan wanita. Dalam kasus ini, pengajaran di dalam kelas haruslah dilangsungkan sesuai dengan pandangan kita, meskipun hal ini akan bertentangan dengan pendapat dari beberapa siswa dan keluarganya (Kelompok Studi Formasi dan Penyebaran Standar Moral di Lingkungan Sekolah, 1979, p. 10).

Hasil dari penelitian juga menganjurkan agar sekolah “menolak” pandangan / pendapat minoritas dari kaum imigran yang tidak sesuai dengan nilai-

nilai yang dianut oleh bangsa Swedia, guna kepentingan dari siswa bangsa Swedia.

Untuk mendorong penerapan ide-ide di atas di kelas-kelas, serangkaian buku paket diterbitkan oleh Departemen Pendidikan pada tahun 1980. Hampir sepuluh tahun setelah dipublikasikannya hasil temuan dari kelompok studi, sebagian guru menggunakan buku paket tersebut sebagai acuan, namun sebagian lagi menghentikan pelaksanaan kegiatan debat kelas mengenai persoalan tersebut. Akan tetapi, terdapat juga pendidik yang berbicara dengan nada menghina mengenai keyakinan mereka akan karakter yang bersifat otoriter yang dimiliki oleh sekolah dan pendidikan, ataupun mengenai pendapat mereka bahwa laporan dari kelompok studi haruslah dilihat sebagai sebuah dokumen yang merupakan respons terhadap konteks politik tertentu, tanpa menimbulkan efek jangka panjang.

Beberapa gagasan yang terdapat di dalam kurikulum nasional 1980 pada bagian Pendidikan dan Perkembangan memang cocok dengan apa yang tercantum dalam laporan penelitian tersebut:

Sekolah haruslah menyediakan pendidikan... dan menanamkan nilai-nilai seperti kemampuan untuk mempertahankan dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam hal toleransi, persekutuan, serta persamaan hak, di dalam diri siswanya... Oleh karena itu sekolah harus berusaha untuk menciptakan keadilan / persamaan antara pria dan wanita... Sekolah harus berusaha untuk menanamkan rasa solidaritas terhadap kelompok minoritas / yang dirugikan yang terdapat di negara ini maupun di seluruh penjuru dunia... serta tekad untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi... Semua ini berhubungan dengan semangat yang menjadi karakter dari sebuah sekolah, harapan dan tuntutan dari orang dewasa serta perkataan dan perbuatan mereka sebagai contoh (Kelompok Studi Formasi dan Penyebaran Standar Moral di Lingkungan Sekolah, 1979, p. 10).

Kurikulum sekolah komprehensif ini memperoleh suara bulat dari seluruh partai politik serta merupakan perpaduan yang menarik dari sesuatu yang disebut dengan pernyataan liberal (seperti yang dikutip pada bab sebelumnya mengenai pembahasan sebuah perspektif konflik mengenai persoalan sosial) dengan ide-ide yang bersifat lebih konservatif mengenai serangkaian nilai yang telah disepakati untuk diajarkan di setiap sekolah. Penggabungan dua unsur yang berbeda dalam sebuah konsensus merupakan sebuah contoh umum dari kebijakan pendidikan di Swedia.

Kesimpulannya, meskipun mayoritas pendidik di Swedia tidak percaya akan adanya pembaharuan minat dalam pendidikan nilai yang terjadi pada tahun 1982-1987 (masa di mana pembaharuan minat terjadi di negara-negara lain yang diteliti), namun terdapat sebuah tradisi yang melibatkan sekolah dalam penetapan nilai-nilai inti dari demokrasi dan solidaritas yang terjadi pada masa pemerintahan koalisi partai konservatif (1976-1982). Bagaimanapun juga, pengalaman bangsa Swedia menggambarkan bahwa perubahan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan nilai, sangatlah lambat dan bahwa perubahan dalam iklim politik membawa pengaruh yang relatif tidak langsung (implisit) dibanding membawa perubahan yang langsung dan segera.

Dengan mempertimbangkan imigrasi serta pengaruhnya terhadap sekolah / pendidikan di negara-negara yang diteliti, beberapa pihak berpendapat bahwa sekolah akan mulai memperhatikan kepentingan dari kaum imigran jika sudah terjadi sebuah aksi tuntutan. Beberapa organisasi yang berskala regional, seperti Badan Eropa (*Council of Europe*) terus memperhatikan dan membela kepentingan dari kebudayaan minoritas, serta merancang sebuah program pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anak kaum imigran. Melalui berbagai publikasi dan seminar, program ini mendapatkan perhatian dan bantuan dari para pendidik. Namun masih terdapat keraguan bahwa pesan / misi yang mereka bawa akan dapat diterima oleh mayoritas guru yang pada dasarnya akan berusaha untuk menekan kaum minoritas untuk membela nilai-nilai lokal. Pada waktu yang bersamaan, faktor ekonomi global eksternal mengakibatkan banyak warga dari kelima negara penelitian menjadi khawatir akan masalah pengangguran dan kompetisi dengan para imigran dalam memperoleh pekerjaan. Cepatnya

perubahan serta meningkatnya pluralisme dalam masyarakat telah menciptakan kegelisahan sehingga banyak orang berusaha untuk memadukan nilai-nilai ini yang berlaku. Kompetisi ekonomi global serta pergeseran dalam pendistribusian kekuasaan dan kesejahteraan di dunia telah memperparah kegelisahan yang ada. Berbagai kritik muncul sebagai akibat dari kegelisahan serta berbagai ancaman terhadap sekolah sebagai lembaga pendidikan dikarenakan perannya dalam proses penanaman nilai pada generasi muda.

Seluruh masyarakat (di kelima negara yang diteliti) menganggap dukungan generasi muda akan nilai-nilai politik, ekonomi dan keagamaan yang terdapat dalam sistem dan tradisi, sebagai sesuatu yang penting. Sekolah dianggap memiliki fungsi pemeliharaan sistem yang esensial dalam mempertahankan nilai-nilai sosial yang sangat diperlukan oleh sistem, namun sekolah harus dapat menjalankan perannya dalam cara yang dalam beberapa aspek pentingnya mungkin berbeda dengan sistem yang berlaku di masa lalu.

Kesimpulan

Baik diskusi mengenai model yang membedakan antara berbagai konteks, sekolah dan keluarga, maupun deskripsi mengenai persamaan dan perbedaan tidak dapat sepenuhnya mengubah besarnya minat generasi penerus di kelima negara Eropa Utara terhadap nilai. Orang tua sangatlah peduli akan nilai-nilai yang diadopsi oleh anak-anak mereka, meskipun banyak dari orang tua yang belum memiliki kepastian mengenai nilai-nilai tertentu yang berguna bagi anak-anak mereka ketika dewasa nanti, dan juga belum memiliki kepastian mengenai cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Model yang ditampilkan dalam penelitian ini merupakan model yang dinamis, hal ini dikarenakan mayoritas energi atau pun kekuatan motif berasal dari kepedulian orang tua. Mayoritas orang tua pada dasarnya mengetahui bidang-bidang tertentu di mana nilai-nilai yang dianut oleh anak mereka sama dengan nilai yang mereka anut, serta bidang-bidang lainnya dengan perbedaan besar dalam nilai yang mereka anut (antara nilai yang dianut oleh orang tua dan anak). Beberapa orang tua di Eropa Utara menganggap usaha untuk membesarkan anak disertai dengan penanaman serangkaian nilai-nilai sosial pada diri anak mereka sebagai sebuah

kewajiban yang berlaku di lingkungan masyarakat, dan mereka sangat peduli akan kontribusi / manfaat dari pendidikan nilai yang mereka berikan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kegagalan maupun jarak yang terjadi dalam pendidikan nilai di lingkungan rumah pada dasarnya merupakan tanggung jawab individu atau keluarga.

Ketika para pengambil kebijakan maupun pertemuan para pendidik membahas mengenai persoalan nilai di kalangan generasi muda, pada dasarnya mereka lebih memperhatikan keinginan / minat dari masyarakat. Dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh pendidikan nilai sangat sulit untuk diukur. Data-data statistik mengenai meningkatnya kejahatan atau penyalahgunaan obat-obatan, maupun menurunnya jumlah pemilih menjadi persoalan yang sering didiskusikan. Namun penginterpretasian dari data-data statistik ini sering kali tidak seragam dan juga sering menimbulkan kesan mengusung ideologi tertentu, yakni ideologi konservatif maupun liberal. Apakah pemerintah kurang memberikan bantuan dana bagi keluarga maupun pendidikan ataukah masyarakat yang sangat bergantung akan bantuan dana dari pemerintah? Haruskah kita menyalahkan para ibu yang bekerja di luar rumah sehingga kurang memperhatikan anak-anak mereka ataukah kesalahan terletak pada kegagalan pemerintah dalam mendanai sekolah-sekolah percontohan atau pusat pengasuhan anak harian yang merupakan tempat tersedianya berbagai model nilai yang tepat untuk diterapkan?

Partai politik merupakan institusi politik yang paling sering ditemui dalam penelitian di kelima negara Eropa Utara serta di wilayah yang menyelenggarakan proses polarisasi. Banyak sekali masukan dalam bidang pendidikan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang berasal dari partai politik, seperti yang terjadi di Inggris. Di Swedia, hal seperti ini terjadi pada masa pemerintahan partai koalisi konservatif di mana pendidikan nilai menjadi topik masalah yang paling sering diperdebatkan. Bagaimanapun juga, tingkat keberhasilan sebuah program sangatlah bergantung pada adanya dua partai utama yang mendukung program tersebut atau tergantung pada kesamaan pandangan dari partai koalisi yang berkuasa.

Di kelima negara yang diteliti, terdapat kepedulian yang besar untuk menjaga agar diskusi kelas tidak mengarah kepada diskusi partisan partai politik (mengarah kepada pemberian dukungan terhadap partai politik tertentu). Namun interpretasi mengenai persoalan pendidikan nilai baik di dalam maupun di luar kelas pada umumnya sering diwarnai oleh faktor ideologi. Polarisasi serta latar belakang dari argumentasi tersebut di beberapa negara tampaknya merupakan akibat dari adanya ketimpangan waktu antara munculnya berbagai pertanyaan mengenai nilai-nilai yang dianut oleh generasi muda, implementasi dari revisi kurikulum atau praktek pendidikan, serta fakta-fakta yang menunjukkan terjadinya sebuah perubahan. Tampaknya mayoritas sekolah belum menuntaskan persiapan kurikulum maupun pelatihan yang diperlukan guna menciptakan sebuah program yang baru, sebelum munculnya berbagai pertanyaan seputar kepedulian sekolah terhadap nilai-nilai yang dianut oleh para siswanya. *Weiler* (1983) berpendapat bahwa sering kali program-program eksperimental digunakan untuk meredam berbagai argumentasi mengenai legitimasi dari pendidikan politik.

Berbagai nilai dan institusi ekonomi membentuk sebuah konteks penting yang mendasar. Pergeseran yang baru-baru ini terjadi di Inggris, yakni pergeseran dari sosialisme menjadi sektor perusahaan swasta, turut mempengaruhi pendidikan. Eratnya persatuan kalangan pekerja pada umumnya dan para ahli pendidikan pada khususnya merupakan sesuatu yang sangat penting, seperti yang terjadi di Swedia. Minat akan berbagi nilai yang berhubungan dengan kerja, baik di negara dengan ekonomi pasar yang tinggi maupun rendah, cenderung sama. Para orang tua dan pendidik sama-sama memiliki investasi tingkat tinggi dalam melihat generasi muda menciptakan karya yang produktif dan memuaskan, yang mana menjadi perhatian luar biasa selama masa di mana terjadi tingkat pengangguran yang tinggi.

Dimensi penting ketiga dari konteks pendidikan nilai yang dilukiskan dalam model tadi adalah kekuatan dan citra negara tersebut di dunia. Tidak satu pun negara-negara ini yang merupakan negara pembangun (*nation-building*), melainkan negara yang bergulat dalam kurikulum mereka dengan persoalan seperti citra nasional mereka dan status di dunia dan bagaimana menumbuhkan rasa bangga akan warisan budaya nasional. Patriotisme nasional relatif menerima

tekanan eksplisit di sekolah, mungkin karena banyak pendidik melihat sebuah garis tipis antara patriotisme dan chauvinisme nasional. Di setiap negara, bagaimana pun juga, ada harapan untuk menumbuhkan sebuah rasa bangga terhadap citra bangsa di luar negeri pada diri remaja; Swedia dan Denmark layak dilihat sebagai contoh yang pantas bagi negara berkembang dari “cara tengah” (middle way) dengan mengarakterisasikan politik dan masyarakat Skandinavia.

Persoalan identitas nasional telah dijadikan titik perhatian di negara ini melalui arus imigran yang tidak memiliki pengetahuan tentang warisan budaya dan juga rasa identitas nasional. Permasalahan ini diasosiasikan dengan pernyataan tegas mengenai kebutuhan akan penanaman nilai bangsa kepada para imigran. Akan tetapi, masih terus terdapat rasa yang bertentangan (ambivalensi), contohnya: Apakah anak-anak keturunan Turki harus benar-benar didorong untuk berpikir bahwa mereka juga adalah orang Jerman atau apakah keluarga muda muslim Pakistan dapat sepenuhnya membawa identitas Inggris?

Lembaga religius di negara-negara ini merupakan sumber utama dari basis pendidikan nilai. Pendidikan agama yang diselenggarakan di sekolah biasanya tidak berhubungan dengan keimanan, dan sangat jarang dilakukan penghafalan akan teks-teks sakral. Meningkatnya pluralisme agama dalam masyarakat dalam beberapa kasus telah mengurangi persesuaian nilai yang didapat di rumah dan sekolah, dan juga telah meningkatkan perhatian tentang pendidikan agama. Di beberapa negara program-program pendidikan agama di sekolah yang cukup berhasil dikembangkan dalam konteks masyarakat dengan latar belakang agama yang homogen. Terutama jika program-program ini merespons terhadap peningkatan aktual dalam pluralisme agama dengan mengembangkan mekanisme untuk menghargai hak orang lain dalam beragama, polarisasi akut dalam pendidikan agama tampaknya berhasil dihindari. Kenyataan di beberapa negara, keberadaan pendidikan agama dalam kurikulum kelihatannya mencoba menanamkan rasa kendali dan jaminan bahwa nilai-nilai dasar yang penting bagi masyarakat manusia telah ditanamkan.

Kesimpulannya, empat dimensi kontekstual bisa dianggap sebagai batas yang mewakili, yang lebih kencang ditarik dan dipaksakan di beberapa negara atau pada beberapa saat daripada di negara lain atau waktu yang lain. Dampak

eksplisit dan implisit dari empat dimensi kontekstual ini adalah dari kepentingan yang luar biasa dalam memahami pendidikan nilai di lingkungan keluarga dan sekolah.

Keluarga

Penelitian ini bukanlah merupakan penelitian mengenai keluarga, hasil penelitian di kelima negara menunjukkan peran dari keluarga terhadap pemerolehan nilai anak baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Penelitian yang membahas mengenai keluarga dan berbagai nilai yang dianut di negara-negara Eropa Barat masih sangat jarang sekali (sebagai contoh, *Jennings dkk.*, 1979). Bagaimanapun juga, di Eropa Barat, pengaruh keluarga terhadap sekolah dalam hubungannya dengan nilai (pendidikan nilai) mulai mendapatkan perhatian, sama seperti yang terjadi di Amerika. Namun partisipasi mereka dibatasi oleh berbagai peraturan, dan mereka tidak merasa bahwa mereka memiliki kekuasaan yang lebih. Di Denmark, dewan sekolah diubah namanya menjadi dewan orang tua. Hanya pihak orang tua saja yang berhak memilih anggota dewan, namun perwakilan guru dan murid tidak memiliki hak untuk memilih. Di Inggris muncul usulan terbaru yang menyarankan pemberian kekuasaan yang lebih kepada orang tua untuk mengontrol sekolah, yakni dengan mengizinkan sekolah untuk menentukan kebijakan lokalnya sesuai dengan suara mayoritas dari para orang tua. Belumlah jelas keuntungan dan dampak yang akan ditimbulkan oleh hal ini. Tak satu pun di kelima negara ini ditemukan kelompok tertentu yang menuntut sekolah untuk mengajarkan atau tidak mengajarkan nilai-nilai tertentu.

Peran dari orang tua kaum imigran terhadap pendidikan nilai di wilayah Eropa Utara belumlah jelas. Tuntutan terhadap pihak sekolah dalam berbagai bidang yang berasal dari pihak orang tua yang mapan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan politik, akan berbeda dengan tuntutan dari generasi sebelumnya.

Sekolah

Akan tetapi, di kedua negara tersebut mata pelajaran yang ditawarkan dan isi atau waktu yang telah ditentukan dalam jadwal dinyatakan secara eksplisit dan

relatif gampang diubah jika dibandingkan dengan kesulitan dalam mengubah asumsi-asumsi implisit yang mengatur interaksi siswa – guru atau menambah frekuensi diskusi terbuka tentang isu-isu kontroversial atau dilema-dilema etis.

Sekolah-sekolah di Eropa utara akan terus menyediakan beberapa bentuk pendidikan nilai bagi semua siswa, sedikit diterima dengan benar daripada halnya 15 tahun yang lalu tapi tidak membuatnya lebih diperhatikan, dibandingkan dengan yang telah dilakukan di beberapa negara lain. Sebagai contoh, mata pelajaran atau ujian pendidikan moral yang spesifik tak mungkin akan dilembagakan.

Ideologi akan terus memiliki pengaruh penting terhadap pendidikan, sebagaimana akan selalu terjadi polarisasi antara pendekatan liberal dan konservatif dalam sekolah dan bergeser ke arah yang lebih dominan, khususnya di negara-negara yang tidak terbiasa dengan politik koalisi. Akan tetap berlangsung kewaspadaan akan ungkapan-ungkapan yang datang dari sudut pandang partisan partai. Bagaimanapun juga kelambanan sekolah akan terus mencegah terjadinya perubahan yang cepat dalam pendidikan nilai. Di beberapa negara faktor ideologi ini akan menyediakan beberapa tingkat kesulitan yang khusus bagi guru dalam persiapannya.

Beberapa pembuat kebijakan pendidikan pergi ke luar negeri demi mencari model keberhasilan dalam penanaman nilai di seluruh program sekolah. Mereka akan cenderung memberi sedikit perhatian untuk memaksa membatasi konteks politik, ekonomi atau agama. Sebaliknya, mereka yang merasa benar-benar terbatas oleh konteks ini akan menegaskan bahwa hanya sedikit yang bisa dipelajari tentang praktek pendidikan yang menjanjikan dari negara lain.

Berikut adalah beberapa pertanyaan penelitian dalam kaitannya dengan kebijakan yang patut mendapatkan perhatian yang lebih dalam:

7. Apakah titik perhatian tentang penanaman nilai kultural dominan sebagai akibat yang tak terelakkan dari migrasi besar-besaran menciptakan sebuah situasi nilai pluralistik dalam masyarakat dan di sekolah? Bagaimana fleksibilitas sekolah dalam menyerap ide-ide baru atau pengaruh kelompok bereaksi dalam proses tersebut? Pada tingkatan apakah perhatian primer ini secara lokal dan nasional?

8. Apakah masyarakat demokratis secara teratur bergeser dari perhatian dari penanaman nilai tradisional menuju nilai-nilai yang lebih terbuka (dan sebaliknya)? Bagaimana pergeseran ini diasosiasikan dengan kewenangan partai politik dalam posisi yang berbeda dari kesatuan kiri - kanan? Bagaimana pergeseran masyarakat seperti ini direfleksikan dalam sekolah yang dipengaruhi konteks sosial politis dan dalam legitimasi keterlibatan sekolah dalam pendidikan nilai?
9. Dibandingkan dengan negara yang memiliki ketetapan tentang pendidikan nilai, apakah ada perhatian yang lain tentang pendidikan nilai di negara-negara yang memiliki sedikit lembaga untuk pendidikan tersebut, seperti pelajaran dalam pendidikan moral dan agama atau sistem sekolah yang terpisah bagi mereka yang berlatar belakang agama yang berbeda?
10. Apakah perbedaan yang besar antara menerapkan kurikulum sentralisasi yang secara eksplisit memasukkan nilai sosial dan menerapkan program yang berasal dari tingkatan lokal atau program-program yang mengungkapkan nilai secara lebih implisit? Apakah penting adanya pelatihan guru bagi karakter yang berbeda? Peran apakah yang dimainkan dalam memilih buku teks atau isi kurikulum secara luas atau sempit dalam situasi yang berbeda ini?
11. Bagaimana iklim sekolah atau kelas sebagai dimensi sekolah dalam kaitannya dengan kurikulum yang lebih eksplisit? Bagaimana penyampaian isi nilai dalam kaitannya dengan cara mengajar dalam membuat keputusan dalam masyarakat demokratis?
12. Apakah model pendidikan nilai tertentu yang cocok untuk sekolah tingkat dasar tampak kurang efektif untuk digunakan pada sekolah tingkat menengah? Dugaan apa yang tepat mengenai kebutuhan akan kemampuan siswa pada usia tertentu?

Penelitian lanjutan seharusnya mengkaji konteks dan kebijakan yang berhubungan dengan berbagai faktor, minat orang tua serta ketiga dimensi sekolah (pendidikan) yang tercantum di dalam model secara bersamaan. Pengaruh kelompok sebaya dan media masa juga perlu diperhatikan. Penelitian

ini akan lebih bermanfaat jika bersifat multi metode (menggunakan berbagai metode). Survei besar-besaran mengenai perilaku siswa dapat menyediakan sebuah *benchmark* (panduan/patokan). Penelitian lintas bangsa dengan menggunakan observasi ruang kelas yang dilengkapi dengan pengujian berbagai kebijakan, wawancara dengan para pendidik dan siswa, serta pengumpulan berbagai informasi, sangat perlu untuk dilakukan. Penelitian ini menampilkan sebuah gambaran mengenai pendidikan nilai yang lebih menyeluruh dan lebih kontekstual, dibanding hasil yang diperoleh dari penelitian yang menggunakan metode tunggal.